

PARAIKATTE

PROGRESSIVE
AND INNOVATIVE

BULETIN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

17 AGUSTUS 2008

Volume 1, No. 2

In this issue:

Creative Accounting	2
Kemiskinan, Ukuran dan Program	3
Apa itu budaya kerja aparatur pemerintah?	6
Agenda Budaya Kerja Paraikatte	7
Etika Birokrasi di Pemerintahan	7
BPKP Sulsel in a Month	10
Menyapa Konsumen	14
Tak Punya NPWP? Apa kata dunia	16
Perubahan	18
Akuntan Negara	19
Menggarap Ladang Ilmu	24
Profil	25
Humor	27
Hot News	28
Info Penugasan	29
Kata Mereka	31

Dari Redaksi



Alhamdulillah, puji syukur kepada yang Kuasa, atas sambutan hangat dari pembaca Buletin Paraikatte edisi perdana yang membawa motto progresif dan inovatif, baik kritik disertai saran ataupun kritik menggelitik semua merupakan bumbu untuk menambah kelezatan edisi berikut ini ditengah kesibukan tugas rutin.

Edisi perdana yang bertema “ **Hidup adalah Perubahan**”, suatu keniscayaan yang harus kita sikapi dalam mengarungi kehidupan yang terus berputar baik secara individu maupun kelompok .

Sebagai anggota kelompok aparatur pemerintah harus menyadari adanya perubahan, sehingga perlu dibangun “Budaya Kerja” agar “*on the track*” alias tidak tersesat .

Mengapa harus ber Budaya Kerja?. Diperlukan sosok aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara **profesional** dengan dilandasi

kaidah, nilai dan norma dalam rangka terciptanya **etika kerja** yang penuh tanggung jawab sebagai suatu **budaya kerja aparatur** .

Buletin Paraikatte berusaha mengomunikasikan kegiatan intern perwakilan BPKP Sulsel baik kegiatan rutin maupun kegiatan ekstra yang mempunyai nilai motivasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Edisi kali ini, Paraikatte menyajikan rubrik-rubrik yang lebih beragam, seperti BPKP in a month, Book Review, Budaya Kerja, Capacity Building serta Hot News. Rubrik-rubrik baru tersebut tentu saja muncul berkat kontribusi dari rekan-rekan seperti Pak Ikhsan, Pak Samid dan Pak Damargo. Untuk lebih menyemarakkan buletin kita, kami terus berharap masukan-masukan dari seluruh rekan-rekan agar upaya pembangunan budaya kerja yang lebih baik segera tercapai.

Terima kasih kepada semua yang memberi semangat untuk lebih berinovatif dalam rangka merespon perubahan, salam perubahan dan meerdeeeekaaaaa.....(didikkris)

CREATIVE ACCOUNTING

Abdul Samid Monri

Rasanya kita sudah cukup bosan dengan berita mengenai kesalahan pencatatan atau manipulasi akuntansi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sampai-sampai ada rencana untuk membuka mata kuliah khusus mengenai accounting manipulation. Seperti yang telah banyak diberitakan, salah satu penyebab utamanya adalah bonus para manajemen terkait erat dengan laba bersih perusahaan yang dikelolanya. Hal ini mendorong pihak manajemen untuk bertindak sebagai *engineer* dalam laporan keuangan dengan tujuan utama yang jelas, mengupayakan laba semaksimal mungkin guna memperoleh bonus yang lebih besar ataupun berkesempatan menjual saham yang mereka miliki karena harga saham akan meningkat bila laba meningkat. Efek dari para engineer tersebut dapat terlihat dari penurunan Indeks Dow Jones. Dow Jones turun sampai 20,5% dari 9.645 pada akhir tahun 2001 sampai mencapai titik terendah di 7.702 pada sekitar awal bulan Agustus lalu. Padahal waktu terjadi peristiwa 911 yang sedemikian heboh saja cuma sanggup menurunkan Dow Jones sekitar 14% ke titik terendahnya.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa *creative accounting* berada di balik terjun bebasnya Dow Jones. Jika dilihat dari Kamus Akuntansi CCH Macquarie, *creative accounting* adalah interpretasi yang dilakukan oleh seorang akuntan dengan mengambil keuntungan atas peristiwa yang tidak diatur oleh standar akuntansi. Namun belakangan istilah tersebut dibelokkan menjadi suatu keuntungan yang diambil dengan cara melakukan penyembunyian atas transaksi tertentu. Makanya cukup menarik jika kita menyimak kasus *creative accounting* dari Worldcom yang mengkapitalisasi biaya operasi sehari-hari ke dalam capital investment. Atau dengan kata lain mencatat biaya sebagai aktiva perusahaan. Sebagai perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di Amerika yang secara konsisten masuk dalam daftar perusahaan yang mencapai tingkat pertumbuhan laba terbesar, dengan total aktiva US\$ 107 miliar, sungguh mengejutkan banyak orang ketika mereka mengakui telah terjadi kesalahan pencatatan dalam jumlah yang signifikan.

Bagaimana kejadiannya?

Selama tahun 2001 dan kuartal pertama tahun 2002, Worldcom memasukan biaya-biaya yang seharusnya dicatat sebagai biaya operasi ke dalam *capital investment* yang jumlahnya mencapai US\$3,8 miliar. Perbedaan perlakuan ini akan menyebabkan perbedaan yang besar dalam perhitungan laba bersih. *Capital spending* seharusnya digunakan untuk membeli asset yang mempunyai nilai pakai yang lama, seperti kabel *fiber optik* ataupun bangunan yang seharusnya didepresiasi sesuai dengan masa manfaatnya. Dalam kasus Worldcom, biaya yang mereka masukan ke dalam aktiva adalah biaya sambungan yaitu biaya yang langsung harus dibayar Worldcom untuk mendapatkan akses untuk jaringannya. Akibatnya jelas, Worldcom harus merevisi laba tahun 2001 dan kuartal pertama tahun 2002.

Bahkan disinyalir terdapat pula kesalahan pencatatan akuntansi lainnya sebesar US\$ 3,3 miliar selama tahun 1999 dan 2000, membuat secara total perusahaan telah melakukan kesalahan pembukuan sejumlah US\$ 7,1 miliar!

Bagaimana ini mempengaruhi laba bersih?

Perlakuan seperti di atas, mencatat biaya yang seharusnya diakui pada tahun terjadinya dengan mengkapitalisasi selama beberapa tahun, akan menyebabkan laba bersih lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan. Sebelumnya, Worldcom melaporkan laba bersih sebesar US\$1,4 miliar dan US\$172 juta pada empat bulan pertama tahun 2002. Seharusnya mereka justru mengalami kerugian baik di tahun 2001 dan empat bulan pertama tahun 2002



jika biaya tersebut dialokasikan pada tahun yang bersangkutan.

Bagaimana ini mempengaruhi arus kas?

Mengkapitalisasi biaya juga akan mempengaruhi beberapa item dari arus kas meskipun arus kas secara total (di luar pembayaran pajak) tidak berubah. Dengan adanya kapitalisasi biaya, laba operasi menjadi lebih tinggi sehingga arus kas operasi akan naik pula. Di lain pihak, arus kas investasi terjadi penurunan karena biaya tersebut dianggap sebagai capital expenditure. Depresiasi juga akan meningkat karena adanya penambahan aktiva tetap. Worldcom melaporkan kas dari operasi sebesar US\$7,7 miliar di tahun 2001 yang seharusnya hanya US\$4,6 miliar. Di sini terjadi mislead informasi yang

sangat menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan.

Mengapa meningkatkan valuasi harga saham Worldcom?

Di dalam istilah analisis atau *fund manager* dikenal dengan suatu metode valuasi EV/EBITDA (enterprise value divided by Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation). EV/EBITDA ini perlakuannya sama seperti P/E ratio. Metode ini sering juga disebut sebagai EBITDA multiple.

Mengambil contoh kasus Worldcom, mereka melaporkan bahwa EBITDA mereka di tahun 2001 adalah US\$10.5 miliar, padahal yang sebenarnya adalah hanya sekitar US\$6.3 miliar.

Enterprise value adalah *market capitalisation* ditambah dengan hutang dan dikurangi kas. Misalkan dalam industry telekomunikasi EV/EBITDA multiple-nya berkisar sekitar 10x. Multiple ini akan digunakan untuk menilai harga wajar dari saham tersebut. Jadi jika Worldcom tidak

mempunyai hutang, maka nilai perusahaan Worldcom menggunakan 10x multiple akan dihargai seharga US\$105 miliar, yang seharusnya adalah hanya sekitar US\$ 63 miliar jika menggunakan standar akuntansi yang sebenarnya.

Jadi investor telah kemahalan menghargai harga saham worldcom sebesar US\$42 miliar (perbedaan antara US\$105 miliar dan US\$63 miliar) karena hasil *creative accounting* tersebut.

Bagaimana selanjutnya?

Begitu banyak yang mempertanyakan bagaimana standar akuntansi yang sebenarnya. Apakah akuntansi sedemikian membingungkan sehingga banyak hal yang bisa diperdebatkan dan mudah diselewengkan. Kasus yang sedemikian banyak mencuat membuat kata *accounting* termasuk dalam salah satu kata terpopuler tahun ini. Paling tidak majalah bisnis di manapun pasti membicarakan mengenai *creative accounting* di atas. Banyak kalangan mempertanyakan independensi dari akuntan publik. Peristiwa di atas membuat prinsip akuntansi awal yang bernama konservatif perlu ditekankan kembali. Apabila terjadi kebingungan dalam menentukan pencatatan suatu transaksi - awal terjadinya *creative accounting*, maka pilihan dijatuhkan pada yang menghasilkan laba lebih sedikit.

Kemiskinan , Ukuran dan Program Anti Kemiskinan.

Damargo Hadiono

Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan tersebut tepatnya pada tanggal 17 tahun 1945, kita menyatakan hari kemerdekaannya. Pada bulan Agustus terlihat keramaian di hampir seluruh pelosok tanah air untuk merayakannya.

Pada 17 Agustus tahun ini yang sebentar lagi tiba, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-63. Namun ditengah-tengah perayaan kemerdekaan, sebenarnya Bangsa Indonesia masih berjuang untuk mengatasi kemiskinan. Cita-cita bangsa sebagai suatu bangsa yang merdeka yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 45 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, nampaknya belum tercapai.

Kasus yang terekspose dalam minggu ini menggambarkan kondisi tersebut memang nyata. Seorang Bapak di Cengkareng Jakarta Barat yang berpenghasilan rata-rata Rp20-30 ribu sehari, kehilangan istri dan anaknya karena tenggelam ketika mencari kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah dan gas yang tak mampu dibeli, di lubang galian air di sekitar rumahnya (Kompas 8/7/2008). Atau seorang ibu muda yang tewas menggantung diri setelah meracuni anaknya juga karena kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sekarang ini memang jauh berkurang dibandingkan dengan pada saat pembangunan dimulai pada tahun 1969. Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 sebesar 40,1 % sementara pada tahun 2007



sebesar 17,75 %, turun sebesar 23,52 %. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007, juga sudah turun dibandingkan pada masa sebelum krisis ekonomi, tahun 1996. Persentase angka kemiskinan tahun 1996 sebesar 17,47 % sehingga terdapat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,89 %.

Jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 1976-2007, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Angka dan % Penduduk miskin Indonesia
Tahun 1976 -2007**

Tahun	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	
	Juta	%	Juta	%	Juta	%
1976	10	38,79	44,2	40,37	54,2	40,1
1978	8,3	30,84	38,9	33,38	47,2	33,3
1980	9,5	29,04	32,8	28,42	42,3	28,6
1981	9,3	28,06	31,3	26,49	40,6	26,9
1984	9,3	23,14	25,7	21,18	35,00	21,6
1987	9,7	20,14	20,3	16,14	30,00	17,4
1990	9,4	16,75	17,8	14,33	27,2	15,1
1993	8,7	13,45	17,2	13,79	25,9	13,7
1996	9,42	13,39	24,59	19,78	34,01	17,47
1998	17,6	21,9	31,9	25,7	49,5	24,2
1999	15,6	19,41	32,3	26,03	47,9	23,4
2000	12,3	14,6	26,4	22,38	38,7	18,95
2001	8,6	9,79	29,3	24,84	37,9	18,4
2002	13,3	14,46	25,1	21,1	38,4	18,2
2003	12,3	13,57	25,1	20,23	37,4	17,42
2004	11,37	12,13	24,78	20,11	36,15	16,66
2005	12,4	11,68	22,7	19,98	35,1	15,97
2006	14,49	13,47	24,81	21,81	39,3	17,75
2007	13,56	12,52	23,61	20,37	37,17	16,58

Sumber : BPS

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar layak manusia dan dapat berupa fisik maupun sosial. Kekurangan fisik meliputi ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan dalam hal nutrisi, kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Kemiskinan dapat dikategorikan dalam Kemiskinan Relatif dan Kemiskinan Absolut. Dalam Kemiskinan Relatif orang atau keluarga dikatakan miskin apabila pendapatannya atau akses mereka pada barang dan jasa yang relatif lebih rendah dari kebanyakan orang atau rata-rata populasi. Sementara dalam Kemiskinan Absolut seseorang akan dianggap miskin apabila tingkat pendapatan absolut atau standar hidupnya ada pada atau mendekati standar hidup minimum.

Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan absolut pada umumnya digunakan indikator Garis Kemiskinan (poverty line). Batas Garis Kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Penduduk yang pendapatannya berada di bawah Garis Kemiskinan dikatakan miskin sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan menggambarkan jumlah penduduk miskin yang berada di negara tersebut.

Beberapa ukuran kemiskinan yang ada, antara lain :

1. Prof. Sayogyo, 1971, dari IPB, menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita (didasarkan kebutuhan kalori per hari dari masyarakat) sebagai dasar untuk mengukur kemiskinan absolut. Untuk daerah pedesaan dikatakan miskin apabila yang bersangkutan mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg sedangkan di daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per kapita per tahun.
2. Bank Dunia menggunakan ukuran kemiskinan yang ekstrim adalah orang yang pengeluarannya kurang dari \$1 per hari dan menurut ukuran yang moderat adalah orang yang pengeluarannya kurang dari \$2 per hari.
3. BPS (2002) menggunakan ukuran kemiskinan dari besarnya pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

Jadi berdasar dapat tabel di bawah, kita dapat mengatakan bahwa sebuah keluarga di perkotaan yang terdiri dari 1 istri dan 2 anak, *akan dianggap miskin*, jika penghasilan sebulannya kurang dari Rp800.000 (4 x Rp 200.000). Padahal kita tahu, di perkotaan, sebuah keluarga dengan penghasilan sebesar Rp 1 Juta sebulan saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan pegawai BPKP yang rata-rata penghasilannya minimalnya di atas Rp2 Juta (Gaji + TKPKN), tergolong di mana?.

Garis Kemiskinan Tahun 1976-2007

TAHUN	(Rupiah/kapita/bln)	
	KOTA	DESA
1976	4,552	2,849
1978	4,969	2,981
1980	6,831	4,449
1981	9,777	5,877
1984	13,731	7,746
1987	17,381	10,294
1990	20,614	13,295
1993	27,905	18,244
1996	42,032	31,366
1999	92,409	74,272
2002	130,499	96,512
2003	138,803	105,888
2004	122.775	108.725
2005	150.799	117.259
2006	175.324	131.256
2007	187.942	146.837

Sumber : BPS

banyak hal seperti pendidikan, lahan, kesehatan, keadilan, dukungan lingkungan atau keluarga, kredit dan sumberdaya produktif lainnya, bersuara dalam institusi dan akses kepada kesempatan yang ada.

Program Anti Kemiskinan

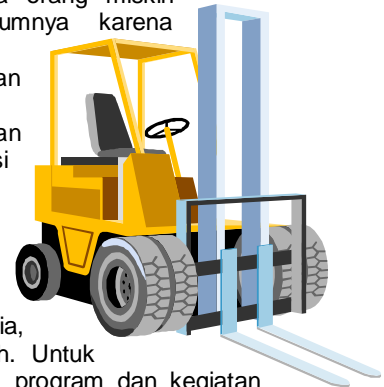
Tingginya tingkat kemiskinan seperti diutarakan oleh Presiden pada pidato awal tahun 2007 merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, selain dari tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya hutang pemerintah. Untuk mengatasinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran *Pro- Poor* kedalam program dan kegiatan antara lain :

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.
- Pogram beras untuk rakyat miskin.
- Bantuan untuk sekolah/pendidikan,
- Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.
- Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program-program tersebut mungkin telah kita kenal, karena sebagian dari Program tersebut diaudit BPKP. Kita ikut berperan untuk memastikan bahwa program telah tepat sasaran, tepat waktu dan dan mutu/jumlah. Pada akhirnya kita berharap, tercapai target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 50 persen, pada tahun 2015, sesuai tujuan pembangunan milleneum. **“ If There is a will there is a way “**

Dalam pengukuran Kemiskinan Absolut, penentuan Garis Kemiskinan sangat penting. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, akan semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Apalagi dengan kemiskinan di Indonesia, di mana banyak penduduk yang mempunyai penghasilan di sekitar Garis Kemiskinan. Sehingga tidak salah data Bank Dunia yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 50 %, pada tahun 2006, jika diukur menggunakan standar Bank Dunia, \$2 per hari.

Oleh karena itu Amartya Sen, pemenang Nobel, menganggap kemiskinan bukan dari sekedar dilihat dari Garis Kemiskinan. Menurutnya orang miskin pada umumnya karena memiliki keterbatasan dalam



BUDAYA KERJA

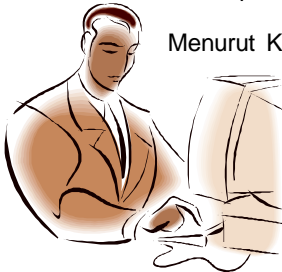
APA ITU BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH? (Seri BUKA)

Drs. Didik Krisdiyanto

Apa itu Budaya Kerja Aparatur Pemerintah itu? Budaya kerja belum sepenuhnya dipahami oleh para pegawai Perwakilan BPKP Sulsel, hal ini terlihat dari jawaban beberapa pegawai yang ditanya tentang apa itu budaya kerja, ternyata jawabannya banyak yang belum mengetahui secara benar makna budaya kerja karena beberapa alasan.

Melalui media ini dikutip beberapa **pengertian budaya kerja**, antara lain :

- § **Pola tingkah laku dan nilai nilai** yang disepakati karyawan dalam bekerja
- § Cara pandang atau cara seseorang memberikan **makna terhadap kerja**
- § Suatu falsafah yang didasari oleh **pandangan hidup** sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi tingkah laku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja
- § Salah satu **komponen kualitas manusia** yang sangat melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolok ukur dasar dalam pembangunan.
- § Merupakan **instrument untuk merubah cara kerja lama menjadi cara baru yang akan** berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat.



Menurut Kep MenPAN Nomor 25/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, BUDAYA KERJA adalah **sikap dan perilaku individu dari kelompok aparatur Negara** yang didasari **atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Memasuki Indonesia merdeka ke 63 perlu kita renungkan bersama apa selama ini kita **sebagai aparatur negara telah ber "BUDAYA KERJA"** dalam mengisi kemerdekaan negara tercinta? (bersambung.....edisi September mengapa dan bagaimana BUKA)

4 Sipa 1 Sipo

Tim Budaya Kerja Perakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan yang menegaskan, " **bahwa BPKP kini, sesuai dengan lagu mars BPKP, tidak saja terdengar suaranya, tetapi BPKP sudah mulai dirasakan keberadaannya sebagai mitra kerja oleh para Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota.** BPKP akan "menuju tangguh dan jaya" yang sangat dibutuhkan perannya oleh pemerintah, tetapi tidak boleh cepat puas diri, namun harus terus meningkatkan peran dan kontribusinya untuk bangsa dan negara sebagai "Auditor Presiden".

Untuk mengemban tugas yang berat yang disampaikan Kepala BPKP, , , perlu ada penyemangat (Motto) dalam bentuk afirmasi kepada masing-masing individu agar apa yang menjadi arahan Kepala BPKP dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas BPKP.

" **RESOPA TEMMANGINGI NAMALOMO NALETEI PAMMASE DEWATA**" (*Hanya dengan bekerja sungguh-sungguh, tak mengenal lelah, terencana dan terukur tujuan yang diinginkan dapat tercapai*),

menjadi semboyan yang akan memberi kemudahan kita semua dalam melaksanakan visi dan misi BPKP, dengan didukung Motto " **4 Sipa 1 Sipo**" kita optimis akan dapat mencapai, apabila kita semua mengamalkan perilaku yang **saling**, yaitu :

1. **Sipatuo** : Saling Mendukung
2. **Sipatokkong** : Saling Menopang
3. **Sipakatau** : Saling Menghargai
4. **Sipakainge** : Saling Mengingat, dan
5. **Siporennu** : Saling Merindukan

Tim Budaya Kerja Perwakilan BPKP Sulsel, berharap dengan afirmasi di atas hal yang berat akan menjadi ringan dan dengan kesungguhan tak mengenal lelah dan terus berupaya, KepastianNya pasti akan datang. Ingat pikiran akan menjadi perkataan, perkataan akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, mudah-mudahan **motto 4 sipa 1 sipo** menjadi bagian **karakter** kita semua. (didik krisdiyanto)

Agenda Budaya Kerja ‘Paraiatte’ Agustus - September:

1. Berdoa Bersama dan motivasi kerja
Setiap pagi pukul 8.15
In Charge: Yohanis Bokko
2. Pelatihan Penggunaan Internet
Setiap Jumat Pukul 14.00 – Selesai.
Materi : Pengenalan Situs,
Browsing, Create Email Address,
Compose Mail, Attachment,
Chatting.
Target Focus : Pegawai BPKP
Sulsel (JFA, Struktural, Non JFA)
In Charge : Toni, Damargo, Ana,
Syaiful
Venue : Gedung Diklat Perwakilan
BPKP Sulsel
3. Buletin Paraiatte
Terbit Setiap tanggal 17 tiap bulan
Artikel, Berita, Foto-foto, unek-unek
dapat dikirim melalui email ke
alamat email
toniyulianto@yahoo.com.
In Charge : Didik K, Toni T, Nur Ana,
Damargo H
4. Bioskop Paraiatte
Setiap Jum'at Pukul 15.30 –
Selesai
Film Paraiatte Bulan ini :
5. Jum'at , 15 Agustus 2008 : The
Pursuit of Happiness
6. Jum'at, 22 Agustus 2008 :
Naga Bonar Jadi 2
7. Jum'at 29 Agustus 2008 : Men
of Honour
8. Jum'at 5 September 2008 :
Kungfu Panda
Venue : Ruang Rapat Kepala
Perwakilan
In Charge : Naomi, Rahmat
5. Bedah Buku
Bedah Buku masih tentative,
menunggu upaya perbaikan
manajemen di perpustakaan yang
saat ini sedang di lakukan oleh Ibu
Naomi dan Bpk. Rahmat.
6. Klub Aerobic Paraiatte
Setiap Jumat, Pukul 07.00 – 08.00
Tempat Parkir Timur BPKP Sulsel
Acara : Aerobic, Pengarahan dari
Kaper, Sarapan Bersama
In Charge : Bidang Tata Usaha
7. English is Fun
Klub Bahasa Inggris, setiap Jum'at
Acara : Talking English is Fun
Venue : Bidang APD
In Charge : Nur Ana.

BOOK REVIEW

ETIKA BIROKRASI DI PEMERINTAHAN

Akzan Runi, SE

Tulisan ini disajikan untuk menyampaikan beberapa point penting dari hasil kajian “pusat penelitian dan pengembangan pengawasan” tentang “*etika birokrasi dipemerintahan*” yang kawan-kawan pfa mungkin belum sempat membaca buku hasil kajian dimaksud yang diterbitkan dengan nomor lhp-828/lb/2007, tgl. 15.11.2007.

Berikut ini sepeggal hasil kajiannya

- Apa pengertian etika birokrasi ?
- Alasan pentingnya etika birokrasi ?
- Apa kaitan budaya birokrasi dengan etika birokrasi ?
- Bagaimana upaya yang dilakukan di beberapa negara maju dalam menerapkan etika birokrasi ?
- Upaya apa yang perlu dilakukan dalam menerapkan etika birokrasi di pemerintahan indonesia ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, marilah kita membaca sekaligus merenung begitu pentingkah birokrat harus beretika dan sudah kah kita mencoba untuk mengaplikasikan dilingkungan oreganisasi kita ?

Dari penelitian yang dilakukan oleh “pusat penelitian dan pengembangan pengawasan” dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Penelitian mengenai korupsi

Faktor utama penyebab korupsi adalah:

1. Moral yang rendah
2. Sanksi yang lemah
3. Rendahnya disiplin
4. Sifat konsumtif, dan
5. Kurangnya pengawasan dalam organisasi

Upaya paling efektif memberantas korupsi adalah:

1. Pemberian contoh oleh atasan
2. Sanksi yang tegas tanpa pandang bulu
3. Perbaikan penghasilan
4. Pendidikan agama dan etika
5. Perbaikan sistem birokrasi
6. Peningkatan pengawasan
7. Transparansi kebijakan pemerintah, dan
8. Peningkatan peran lembaga legislatif

li. Penelitian mengenai evaluasi penerapan/pelaksanaan aturan perilaku pemeriksa bpkp.

Aturan perilaku pemeriksa bpkp belum sepenuhnya diterapkan, disebabkan:

1. Terlalu teoritis sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan di lapangan, belum dilengkapi dengan juknis.
2. Tidak ada keteladanan atau panutan dari para senior ataupun pejabat dalam berperilaku
3. Tidak tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggar
4. Kurang dilakukan sosialisasi untuk menjadikan seluruh pemeriksa mengetahuinya.

lii. Penelitian upaya pemberantasan kkn melalui pengembangan etika

1. Hasil penelitian terhadap 6 instansi/lembaga pemerintah termasuk bpkp mengatakan bahwa:
2. Etika adalah tidakan rasional dgn dasar aturan moral, diikuti nilai-nilai yang diterima sabagai aturan main.
3. Aturan etika adalah segala peraturan, apapun namanya, yang diterapkan dalam organisasi, dan kode etik serta aturan perilaku.
4. Tindakan kkn merupakan pelanggaran terhadap etika yang memerlukan dilakukannya tegoran apabila terjadi tindakan kkn karena berakibat merusak citra instansi
5. Metode edukasi yg paling efektif dlm menerapkan etika adalah keteladanan pimpinan dan penerapan aturan etika yang konsisten dilengkapi dgn kebijakan *reward* dan *punishment*, serta dilakukannya pengembangan karakter dan siraman rohani secara kontinyu.

Pengertian etika birokrasi

1. Etika birokrasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan pergaulan manusia dalam suatu tempat dimana mereka berkumpul dan berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu adat yang menjadi kebiasaan
2. Adat dan kebiasaan, dibentuk oleh ahlak, watak, dan cara berpikir yang mempertimbangkan perasaan manusia sehingga membentuk sikap individu

3. . Etika secara ringkas adalah sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan, yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan orang.
4. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan dan pegawai atau orang-orang menjalankannya dikenal dgn sebutan birokrat atau pegawai negeri, atau aparat pemerintah.
5. Etika birokrasi diartikan sistem yang berisikan nilai-nilai yang menjadi prinsip moral atau aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan
6. Dengan berpegang pd nilai-nilai yang menjadi prinsip moral (*jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun*), maka aparat pemerintah dapat menjalankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan harapan sehingga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap mereka.
7. Etika birokrasi berkaitan dgn budaya birokrasi, adalah tatanan perilaku dan perbuatan (*conduct*) pegawai negeri sehari-hari yang diinginkan dan diharapkan masyarakat berdasarkan aturan-aturan dari karakteristik yang dicita-citakan atau nilai-nilai (*values*) yang menuntun keputusan dalam bertindak untuk menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Pentingnya birokrat beretika

- ✚ Menurunnya kepercayaan masyarakat karena semakin maraknya kasus-kasus korupsi, penyimpangan, dan kebohongan publik yang melibatkan pegawai pemerintah
- ✚ Etika sangat dibutuhkan bagi pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya secara benar dan sesuai aturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dijaga
- ✚ Sebagian besar faktor penyebab korupsi terkait dengan masalah moral dan etika
- ✚ Aturan etika menjadi landasan yang baik bagi para birokrat dalam membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan publik

Kaitan budaya birokrasi dengan etika birokrasi

Budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Sistem nilai-nilai ini dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan sdebagai acuan berperilaku dalam menyelesaikan masalah adaptasi ke luar dan integrasi kedalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

Pembentukan budaya organisasi terutama dipengaruhi oleh sifat bawaan dari manajemen yaitu falsafah hidup, nilai-nilai budaya, visi, misi dan tujuan dari manajemen yang kemudian diselaraskan untuk semua anggota organisasi

Budaya organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mengkristal kedalam organisasi

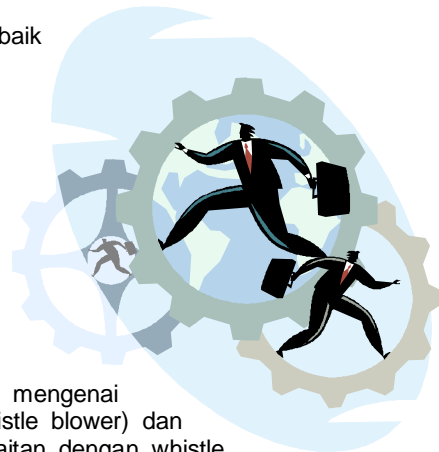
Upaya yang dilakukan di beberapa negara maju dalam menerapkan etika birokrasi

- ✚ Di new zealand, perilaku yang baik dan pantas bagi PNS didasarkan 3 prinsip
 - ✚ Melaksanakan kewajibannya menurut hukum dgn profesional dan berintegritas
 - ✚ Melaksanakan tugas resminya dgn jujur, dapat dipercaya, efisien, dan menghargai hak publik dan hak sejawatnya
 - ✚ Tdk membahayakan martabat dan nama baik organisasi

Ketiga prinsip ini dijabarkan aturan perilaku *code of conduct* pegawai negeri

- ✚ Di Australia, menganut prinsip sama dengan New Zealand dan aturan perilaku dimuat dalam *code of conduct* yang berisikan 13 aturan perilaku
- ✚ Di Amerika Serikat perilaku dimuat dalam *code of conduct* yang berisikan 14 aturan perilaku. Setiap instansi diwajibkan membuat *code of conduct* masing-masing

Aturan perilaku di tiga negara tersebut juga mengatur mengenai kewajiban melaporkan perilaku yang melanggar etika (*whistle blower*) dan aturan hukum untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan *whistle*



blower.

Intinya aturan perilaku dibuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dlm melaksanakan tanggung jawabnya

Prinsip-prinsip dalam mengelola etika pegawai negeri

- a. Harus jelasnya standar etika yang berlaku pada pegawai negeri;
- b. Standar etika harus dimuat dalam kerangka aturan hukum;
- c. Pedoman etika harus tersedia bagi pegawai negeri;
- d. Pegawai negeri mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya berkaitan dengan tuntutan pelanggaran etika;
- e. Harus ada komitmen politik untuk menegakkan perilaku beretika di pegawai negeri;
- f. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk pengawasan publik;
- g. Harus ada pedoman yang jelas mengenai hubungan antara sektor publik dan sektor swasta;
- h. Para pimpinan dan pejabat harus memperlihatkan dan memajukan perilaku yang beretika;
- i. Kebijakan manajemen, prosedur-prosedur dan praktek-prakteknya harus memajukan perilaku beretika;
- j. Kondisi-kondisi di pegawai negeri dan manajemen sumberdaya manusia harus memajukan perilaku beretika;
- k. Harus terdapat mekanisme akuntabilitas yang layak di dalam kepegawainegrian;
- l. Harus terdapat penerapan prosedur-prosedur dan sanksi untuk menangani pelanggaran etika

BPKP SULSEL IN A MONTH

Launching Buletin Paraikatte

oleh Toni Triyulianto



Bertempat di Parkir Timur Kantor Perwakilan BPKP Makassar, Buletin Paraikatte Innovative and Progressive di launching oleh Kepala Perwakilan BPKP Makassar pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan mengungkapkan rasa bangganya terhadap ide-ide kreatif yang muncul terkait dengan penerbitan Buletin. Beliau mengharapkan agar Buletin Paraikatte bisa menjadi sarana media komunikasi antar pegawai, dan juga menjadi inspirasi bagi perubahan mindset kearah yang lebih baik.

*Mimpi di hadirkan dalam hidup bukan hanya sebagai hayalan, namun sebuah titik tolak pencarian. dan mimpi-mimpi di buat untuk diraih.. BERMIMPI LAH !!!
BON COURAGE ... !!!*

Indahnya Kebersamaan / Kebersamaan dan Dinamika Kelompok

Oleh : Toni Triyulianto

Bertepatan dengan pembukaan olimpiade Beijing tanggal 8-8-08, Bapak Kepala Perwakilan secara tiba-tiba memberikan ucapan selamat ulangtahun kepada dua orang pegawai BPKP Sulsel, yang secara kebetulan bersamaan berulantahun di tanggal dan hari yang sama... tanggal 8 Agustus 2008. Bapak Alimuddin yang merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan merayakan hari ulangtahunnya yang ke 50, sedangkan Bapak Agus Catur, PFA di bidang Akuntan Negara, merayakan ulang tahunnya yang ke- 38.



Acara "surprise party" tiup lilin dan pemotongan kue tart di lakukan setelah kegiatan Aerobic bersama di Lapangan Parkir Timur BPKP Sulsel. Acara tersebut di hadiri oleh seluruh pegawai BPKP Sulsel yang berjumlah sekitar 170-an. Acara perayaan ulangtahun tersebut bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan di antara karyawan BPKP Sulsel, sekaligus juga sebagai salah satu kegiatan pengembangan budaya kerja. Acara tersebut di akhiri dengan sarapan bersama "Bubur Manado + Ikan Asin". Indahnya Kebersamaan...

Membangun sebuah tim yang kuat bukan masalah memilih orang yang ahli suatu bidang. Tetapi lebih kepada memilih orang yang tepat untuk menjadi tim Anda.

(tepat dalam bidangnya dan tepat dalam bekerja sama serta tepat dalam perkataan).

PERINGATAN ISRA MI'RAJ

oleh : **H. A. Samid Monri, SE., Ak**

Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 di Majid At Taubah Perwakilan BPKP Sulsel, diadakan peringatan hari Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bpk. Tahmid Husein, SE. Dalam sambutannya beliau mengharapkan bahwa dengan memperingati hari Isra Mi'raj, kita dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Acara tersebut menghadirkan Ustadz Drs. Kusnaedi Ali, M.Ag. Dalam ceramahnya beliau memberikan simpulan atas hikmah dari peringatan Isra Mi'raj, yaitu :

1. Perjalanan Wisata Rohani

Isra Mi'raj merupakan wisata rohani yang Allah berikan

kepada Nabi Muhammad setelah beberapa saat sebelumnya. Untuk menghibur ke Gundahan beliau dan beban berat setelah ditinggal oleh orang yang selama ini mendukung sepenuhnya telah tiada yaitu dukungan politik oleh pamannya Abu Tholib dan donatur utamasekaligus pendamping setia beliau yaitu ibunda Khodijah RA. Kita sebagai orang mukmin juga memerlukan perjalanan wisata rohani untuk menambah/meningkatkan keimanan kita dalam rangka kepasrahan diri secara total kepada Sang Khalik

2. Perjalanan Wisata Rohani

Isra Mi'raj merupakan wisata rohani yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad setelah beberapa saat sebelumnya. Untuk menghibur ke Gundahan beliau dan beban berat setelah ditinggal oleh orang yang selama ini mendukung sepenuhnya telah tiada yaitu dukungan politik oleh pamannya Abu Tholib dan donatur utamasekaligus pendamping setia beliau yaitu ibunda



Kita sebagai orang mukmin juga memerlukan perjalanan wisata rohani untuk menambah/meningkatkan keimanan kita dalam rangka kepasrahan diri secara total kepada Sang Khalik

3. Penguatan Keimanan kepada yang Ghoib

Peristiwa Isra Mi'raj, adalah merupakan supranatural yang hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan yang dalam karena peristiwa tersebut tidak bisa diyakini dengan logika rasional manusia pada umumnya. Keyakinan akan hal yang ghaib akan membawa keimanan yang mendalam dan pada akhirnya melahirkan semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah SWT. Hal-hal yang ghaib tersebut adalah adanya surga dan neraka, pahala dari Allah, Malaikat, Jin dan lainnya. Ketidaktepatan keyakinan kepada hal-hal yang ghaib berdampak pada kualitas ibadah kita bahkan cenderung hanya sekedar memenuhi (menggugurkan) kewajiban, belum sampai pada tingkat kebutuhan yang menyenangkan. Seandainya manusia tahu pahala-pahala (tidak dapat dilihat seketika di dunia) ibadah sholat isya dan subuh berjamaah, pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari (seluruh isi)

bumi dan langit, dan balasan atas harta yang dibelanjakan dalam bentuk infaq...maka manusia akan bersusah payah untuk tetap melaksanakannya, namun karena pahala-pahala tersebut tidak nampak di mata, maka sebagian besar manusia tidak bersungguh-sungguh meraihnya. Itu semua diperlukan keimanan yang sempurna atas hal-hal yang ghoib tersebut

4. Perintah Sholat

Perintah sholat merupakan indikator utama ketaqwaan seseorang yang akan membawa kebahagiaan seseorang di surga. Karena sholatnya yang menjadi hal pertama kali ditanya di yaumul akhir, jika baik sholatnya maka baik pula amal ibadahnya dan pertanggungjawaban setelahnya, namun jika pertanyaan sholat tidak dapat dijawab maka pertanggungjawaban amal ibadahnya yang lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu agar Sholat kita memberikan dampak bagi kualitas pribadi maka persyaratan utama adalah ke khusu'an sholat. Tips agar sholat menjadi khusu' :

1)
Kh



susu' dalam persiapan shalat

- Persiapan badan (bersih dengan mandi dan wudlu)
- Persiapan tempat yang suci yaitu di dalam masjid

- Menjawab adzan untuk menyiapkan mental
 - Khusu' pakaian
 - 2) Khusu' dalam bacaan sholat
- Hendaknya setiap bacaan yang kita baca di pahami artinya sehingga membekas di dalam hati sanubari.
- 3) Khusu' memaknai gerakan sholat
 - 4) Khusu' kan hati dengan cara ingat mati dan ingat kubur.



Sosialisasi Budaya Kerja

Oleh Humas BPKP Sulsel

Dalam rangka lebih memantapkan penerapan Budaya Kerja, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Drs. Syukri MM, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 mengadakan pertemuan untuk membahas agar budaya kerja dapat difahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Pertemuan tersebut diadakan, bertepatan dengan hari libur nasional "Isra Mi'Raj" dan dihadiri oleh pejabat struktural, pengendali teknis, PFA serta staf. Untuk berbagi pengalaman dan membuka wawasan mengenai penerapan budaya kerja, dalam pertemuan tersebut, diundang Ibu Hidayaturahmi, S.Sos, MPA seorang Instruktur dari STIA LAN Makassar yang biasa memberikan materi mengenai Budaya Kerja dan Pelayanan Prima di Instansi Pemerintah. Beliau adalah anggota Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan istri dari salah seorang pejabat fungsional di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Ibu Ami penerapan budaya kerja yang awalnya dilakukan pada sektor swasta dapat juga dilaksanakan pada sektor pemerintahan Pada dasarnya yang tersulit adalah menyangkut perubahan pola pandang dari seluruh personil yang ada, agar dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja.

Namun kesemuanya dapat dilakukan meski perubahannya tidak langsung secara seketika. Untuk menerapkannya diperlukan komitmen tidak hanya dari pimpinan tertinggi tetapi juga meliputi seluruh pegawai.

Pencerahan yang didapat ternyata telah memberikan motivasi dan menumbuhkan optimisme budaya kerja dapat diterapkan dan diinternalisasikan pada seluruh pegawai. Pada akhir pertemuan Kepala Perwakilan mengharapkan agar hasil pertemuan tersebut segera disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Hasil Revitalisasi Budaya Kerja Bagian Tata Usaha **BPKP Sulsel**

Oleh Humas BPKP Sulsel

Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja para pegawai Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, serta mengingat peran BPKP sebagai "Pilot Project Budaya Kerja" oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sejak Tahun 1998, bertempat diruangan Rapat Kepala Perwakilan, Kamis pagi (31/7) diselenggarakan Rapat Revitalisasi Budaya Kerja diantara para pegawai Bagian Tata Usaha BPKP Provinsi Sul Sel.

Rapat dihadiri oleh 50 orang pegawai Bagian Tata Usaha, yang dibuka oleh Purwanto, Ka.Sub.Bag Kepegawaian BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir pula sebagai pemateri sekaligus memberikan sambutannya Tahmid Husen, Kepala Bagian Tata Usaha.



Dalam sambutannya, Tahmid Husen mengemukakan bahwa Budaya Kerja merupakan hal yang mendesak untuk ditingkatkan pengaplikasiannya dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari di lingkungan kerja organisasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam materinya, Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan mengenai Budaya Kerja sebagai cara kerja sehari-hari yang bermutu dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi dan memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani. Dijelaskan juga antara lain mengenai Nilai Budaya Kerja dari sudut berbagai agama, manfaat budaya kerja, serta

kapankapan budaya organisasi dimulai.

Nilai-nilai Budaya Kerja yang dijadikan acuan adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Jepang, mengingat pencapaian mereka yang luar biasa di Bidang Teknologi (High-Tech), sehingga membuat para praktisi mulai mencari faktor apa yang membuat tanggunhnya produk-produk jepang. Pencarian tersebut bermuara pada dugaan bahwa faktor penting penentu

suksesnya masyarakat Jepang adalah Culture (Working Culture).

Rapat ini mendapat antusiasme yang cukup dari peserta, dengan adanya beberapa pertanyaan yang menyentuh langsung pada penerapan budaya kerja di kantor, serta sharing mengenai permasalahan-permasalahan terkini.

Sebagai penutup, Tahmid Husen memaparkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan budaya kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, antara lain: Pembuatan buku informasi hotel, restaurant, dan tempat-tempat wisata serta agen-agen perjalanan; Penataan tempat parkir; Penataan Kearsipan; Penataan Taman; serta agenda kegiatan lainnya.

SISI LAIN

MENYAPA KONSUMEN / STAKEHOLDERS

(Kisah sang pelayan toko dan sopir van)

Oleh : Abdul Samid Monri

Saya bersama seorang teman, baru saja mengikuti sebuah seminar Peran Bank Syariah dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi di sebuah Hotel di Kota Kualalumpur Malaysia. Karena ada beberapa jam kosong, kami berkeliling-keliling sekitar kota yang sangat indah itu.

Kami masuk ke sebuah toko kado, yang dikelilingi oleh ruang-ruang besar penuh dengan bunga-bunga dan tanaman berwarna-warni yang tertata indah. Saya terkesan dengan keindahan tempat tersebut – penataan yang brilian, warna-warna yang cerah, kontras, dan arsitektur bebatuan, yang terhampar seperti latar belakang sebuah kisah dongeng.

Berjalan ke toko kado, kami disambut oleh seorang wanita muda yang cantik nan rupawan dengan pakaian yang rapi. Ia berjalan ke arah kami dengan wajah tak sabar.

Kata-kata pertamanya adalah, “Kami tutup lima belas menit lagi!”.

Wow! Itulah sapaannya. Mengagumkan!. lebih menyakitkan daripada jika ia melempar bunga kering ke muka bumi.

Yang terpikirkan oleh saya untuk saya katakana hanyalah, “Yah Baiklah, kami akan pergi kalo begitu. Dan ... kami akan mencoba tidak mengganggu jadwal Anda dengan membeli sesuatu!”.

Gadis cantik nan rupawan tersebut berbalik dan kembali ke meja kasir dan melihat jamnya untuk

memastikan kami menepati janji.

Itu benar-benar terjadi. Hebat! Saya tidak bisa mempercayainya. Di sana, di tempat yang sangat menarik dengan jutaan dollar dihabiskan untuk gedung, taman, dan interior, kami menerima perlakuan seperti itu. Jika hal tersebut terjadi di tengah malam kegelapan di sisi kota yang kumuh, saya bisa menerimanya. Tetapi pendekatan seperti di tempat seindah itu, oleh orang semenarik itu, sangat sulit dipercaya.

Sekarang, bandingkan dengan pengalaman lain

yang saya alami. **Ferry Firdaus (FF)** adalah seorang sopir van yang sopan pada perusahaan parkir di Kota Metropolitan Kuala Lumpur. Saat ini, jujur saja, banyak sopir dari lapangan parkir satelit ke bandara yang tidak menunjukkan sama sekali apa yang dapat Anda sebut pelayanan konsumen/stakeholders yang memuaskan. Tetapi justru di situlah FF membedakan dirinya.

Ia mulai dengan sebuah sapaan yang hangat dan ramah, begitu ia melompat dari van untuk membawakan bagasi kami. Saat kami duduk, ia menawarkan permen pada kami. Papan besar di depan van mengumumkan, "Sopir anda adalah FF". Dan kalo penumpang tidak memperlihatkan tanda itu, ia sendiri yang mengumumkan namanya lewat pengeras suara.

Setelah itu FF memberikan waktu, suhu, tekanan udara, dan jadwal keberangkatan pesawat. Kemudian ia mengumumkan tiga berita besar lokal, lalu tiga headline nasional, dan akhirnya berita internasional.

Segera setelah menyelesaikan berita, ia menanyakan pada penumpang kota tujuan mereka. Begitu mereka mengatakannya, ia menginformasikan temperatur tetinggi dan terendah kota-kota tersebut. Tidak, saya tidak berbohong – ia benar-benar melakukan hal tersebut.

Dalam "4 menit 22 detik" yang diperlukan FF

untuk mengantarkan orang-orang dari lapangan parkir ke tempat check-in pesawat, ia telah mendemonstrasikan suatu studi kasus pelayanan yang baik, yang harus ditiru dan diperhatikan banyak pelaku bisnis. Dengan caranya sendiri yang unik ia tampil beda dari sopir bandara yang lain yang pernah saya temui.

Upahnya? Yah, saya hanya dapat menebak. Tetapi sepertinya ia menikmati pekerjaannya lebih dari kebanyakan orang. Juga, seperti yang saya perhatikan saat ia menolong orang, saya kira ia mendapat *tip* dua kali lipat dari sopir yang lain.

Dari perjalanan saya dengan FF, saya telah mengamati elemen-elemen pelayanan konsumen yang baik ini, yaitu :

1. Ia melihat dengan jelas pekerjaannya, sebagai suatu kesempatan untuk melayani orang lain.
2. Ia menikmatinya.
3. Ia menyebabkan orang-orang menyukainya dan dengan segera merasa nyaman.
4. Ia melakukan sesuatu (memberikan permen) yang tidak disangka konsumen.
5. Ia membuat orang terkesan dengan pengetahuannya tentang berita dan cuaca.
6. Ia menjadikan perjalanan lima menit sebagai suatu peristiwa yang menghibur.

Apa pun yang anda lakukan, anda juga bisa membuat diri anda berbeda dari orang lain. Anda dapat melakukan seperti yang

dilakukan FF dan menjadikan pekerjaan anda suatu studi kasus yang kreatif tentang pelayanan konsumen. Dalam menyapa konsumen/stakeholders, setidaknya beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Semuanya dimulai dengan kesan pertama.
2. Lakukan dengan kontak mata.
3. Ucapkan terima kasih pada mereka karena telah datang, menghubungi atau menemui anda.
4. Abaikan yang lain dan dengarkan mereka

Siapapun anda, anda adalah penjual barang atau jasa. Dalam aktivitas anda menjual, anda butuh komunikasi. Perlu anda tahu bahwa komunikasi yang anda lakukan beberapa detik pertama yang anda lakukan dengan konsumen anda. Perasaan dan persepsi yang terbentuk sering berlangsung untuk selamanya.

Kontak mata, sikap, dan kemampuan anda memecah keasyikan, mengabaikan yang lain dan hanya mendengarkan orang di depan anda, dengan segera akan memengaruhi orang tersebut.

Ini tidak bisa dijelaskan dengan logika, semua ini terjadi secara emosional. Sikap nonverbal, bahasa tubuh, dan ekspresi muka anda dengan cepat menciptakan kesan di bawah sadar pada orang-orang yang anda hadapi.

Konsumen akan mengatakan pada diri sendiri secara sadar, "Saya suka orang ini", Saya merasa nyaman dengan orang ini", Saya ingin melakukan bisnis dengannya".

Atau di bawah sadar, mereka mungkin berkata pada diri mereka sendiri, "Saya tidak merasa nyaman berbisnis disini", "Orang ini tidak benar-benar tertarik pada saya", Ini bukanlah tempat saya ingin melakukan bisnis".

CURRENT ISSUE

TIDAK PUNYA NPWP? APA KATA DUNIA....

Tony Triyulianto

Email yang mampir di email address saya kemarin cukup menyedot banyak comment dari teman-teman millis saya. Email tersebut bertajuk pemberian insentif bagi individu yang memiliki NPWP, dan berita mengenai kenaikan layer tarif pajak progressif WP orang pribadi. Sebenarnya beritanya cukup menggembirakan ... tetapi tidak begitu banyak berarti bagi saya... Hmm.. mungkin karena kabar remunerasi yang masih sebatas angin sorga, sehingga berita tersebut tidak terlalu nge-effect bagi saya... But at least... I've just thinking... mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Monggo...

Insentif Bagi Pemilik NPWP

Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan banyak menerima insentif. Pemberian insentif ini adalah upaya pemerintah untuk memperluas basis masyarakat pembayar pajak. Insentif tersebut seperti pembebasan biaya fiskal ke luar negeri mulai 2009 bagi yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun.

"Bagi yang punya NPWP akan dibebaskan dari biaya fiskal luar negeri mulai 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus mulai 2011," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat persetujuan RUU PPh di tingkat Panja DPR Komisi XI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (17/7/2008). Selain itu untuk merangsang peningkatan pemilik NPWP, dalam aturan RUU PPh ini juga diatur penerimaan tarif pemotongan atau pemungutan PPh yang berbeda. Bagi wajib pajak (WP) penerima penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemotongan PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal. Tapi bagi WP penerima penghasilan dari jasa yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.

"Dan bagi WP yang dikenakan PPh pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP, dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal, ini tentunya menjadi insentif untuk mempunyai NPWP," kata Sri Mulyani..

Insentif-insentif ini diatur dalam RUU PPh baru yang telah disetujui oleh Panja Komisi XI DPR dan segera disahkan menjadi UU PPh yang baru

Tarif PPh terbaru bagi WP Orang Pribadi

Besaran tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pada RUU PPh yang baru akan diturunkan besarnya dari 35% menjadi 30% pada tahun 2009. Dalam RUU tersebut, WP Orang Pribadi akan dikenakan pajak progresif dengan lapisan dan tarif sebagai berikut :

1. Lapisan PKP (Pendapatan Kena Pajak) sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%;
2. Lapisan PKP Rp 50 juta s.d Rp 250 juta dikenai tarif sebesar 15%;
3. Lapisan PKP Rp 250 juta s.d Rp 500 juta dikenai tarif 25%;
4. Lapisan PKP di atas Rp 500 juta dikenai tarif sebesar 30%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aturan dalam RUU PPh ini, berubah dari UU PPh sebelumnya. Bagi WP pribadi tarif tertinggi turun dari 35% jadi 30% dan menghapus lapis tarif 10%, sehingga lapisan tarif berkurang dari 5 menjadi 4. Sementara lapisan penghasilan kena pajak atau *income bracket* yang semula lapis tertinggi sebesar Rp 200 juta dinaikkan menjadi Rp 500 juta.

"Saya tadi tanya Pak Darmin saya masuk lapis *bracket* yang keberapa, dia bilang gaji menteri masuk yang lapis

kedua, tapi Dirjennya yang pertama," celetuk Sri Mulyani dalam rapat persetujuan RUU PPh di tingkat Panja DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (17/7/2008).

Kemudian, pada RUU yang baru ini tarif WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap disepakati menjadi 28% pada 2009 dan menjadi 25% di 2010. "Semula ada 3 lapis tarif yaitu 3%, 5% dan 10%, menjadi tarif tunggal 28% pada 2009 dan 25% pada 2010," ujar Sri Mulyani.

PPh21 SAAT INI

STATUS PAJAK (137/PMK.03/2005) Berlaku 1 Jan 2006		JUMLAH PENGURANG DALAM SETAHUN			
		WAJIB PAJAK	STATUS KAWIN	ANAK/ TANGGUNGAN	TOTAL
S0	LAJANG	Rp 13.200.000			Rp 13.200.000
S1	LAJANG DG 1 TANGGUNGAN	Rp 13.200.000		Rp 1.200.000	Rp 14.400.000
S2	LAJANG DG 2 TANGGUNGAN	Rp 13.200.000		Rp 2.400.000	Rp 15.600.000
S3	LAJANG DG 3 TANGGUNGAN	Rp 13.200.000		Rp 3.600.000	Rp 16.800.000
M0	KAWIN TANPA ANAK	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000		Rp 14.400.000
M1	KAWIN DG 1 ANAK	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 15.600.000
M2	KAWIN DG 2 ANAK	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 2.400.000	Rp 16.800.000
M3	KAWIN DG 3 ANAK	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	Rp 18.000.000

MESKIPUN NNT MENGAKUI 4 TANGGUNGAN TAPI PEMERINTAH HANYA AKUI 3 SAJA

TARIF PAJAK (ADA 5 GOLONGAN TARIF PAJAK) SEKARANG

GOLONGAN I	LAPISAN PENGHASILAN 0 - Rp. 25 JUTA PER TAHUN	TARIF 5%
GOLONGAN II	LAPISAN PENGHASILAN Rp 25 JUTA - Rp. 50 JUTA PER TAHUN	TARIF 10%
GOLONGAN III	LAPISAN PENGHASILAN Rp 50 JUTA - Rp. 100 JUTA PER TAHUN	TARIF 15%
GOLONGAN IV	LAPISAN PENGHASILAN Rp 100 JUTA - Rp. 200 JUTA PER TAHUN	TARIF 25%
GOLONGAN V	LAPISAN PENGHASILAN Rp 200 KEATAS	TARIF 35%



PPh21 Tahun 2009

ASUMSI PTKP WAJIB PAJAK JADI RP 15.840.000 PER TAHUN

STATUS PAJAK ATURAN BARU (1 Jan 2009)		JUMLAH PENGURANG DALAM SETAHUN			
		WAJIB PAJAK	STATUS KAWIN	ANAK/ TANGGUNGAN	TOTAL
S0	LAJANG	Rp 15.840.000			Rp 15.840.000
S1	LAJANG DG 1 TANGGUNGAN	Rp 15.840.000		Rp 1.320.000	Rp 17.160.000
S2	LAJANG DG 2 TANGGUNGAN	Rp 15.840.000		Rp 2.640.000	Rp 18.480.000
S3	LAJANG DG 3 TANGGUNGAN	Rp 15.840.000		Rp 3.960.000	Rp 19.800.000
M0	KAWIN TANPA ANAK	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000		Rp 17.160.000
M1	KAWIN DG 1 ANAK	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 18.480.000
M2	KAWIN DG 2 ANAK	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000	Rp 2.640.000	Rp 19.800.000
M3	KAWIN DG 3 ANAK	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000	Rp 3.960.000	Rp 21.120.000

MESKIPUN NNT MENGAKUI 4 TANGGUNGAN TAPI PEMERINTAH HANYA AKUI 3 SAJA

BERUBAH JADI 4 GOLONGAN TARIF PAJAK 1 JAN 2009

GOLONGAN I	LAPISAN PENGHASILAN 0 - Rp. 50 JUTA PER TAHUN	TH 2009 TARIF 5%
GOLONGAN II	LAPISAN PENGHASILAN Rp 50 JUTA - Rp. 250 JUTA PER TAHUN	TARIF 15%
GOLONGAN III	LAPISAN PENGHASILAN Rp 250 JUTA - Rp. 500 JUTA PER TAHUN	TARIF 25%
GOLONGAN IV	LAPISAN PENGHASILAN Rp 500 JUTA KEATAS	TARIF 30%

MOTIVASI

PERUBAHAN

Oleh : Damargo Hadiono

Perubahan di sektor pengelolaan keuangan negara untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas publik dan pemerintahan yang baik terus berlangsung. Ketentuan pengelolaan keuangan negara yang semula ditetapkan dalam ICW, RAB dan IAR digantikan dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Akuntansi Pemerintahan yang dapat menyusun neraca pemerintah dan pernah penulis pelajari tahun 1990-an yang diajarkan " Pak Kerry Sutjipto", mulai terwujud dengan adanya Neraca Pemerintah sejak tahun 2004. Pencatatan akuntansi pemerintahan yang tadinya dilakukan secara *single entry*, sekarang secara *double entry*. Di sisi penganggaran sekarang dikenal anggaran berbasis kinerja dimana ditetapkan indikator pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan, meskipun penerapannya baru sekedar untuk memenuhi ketentuan yang ada, belum ke-esensinya. Selain itu juga diterapkan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan penerapan anggaran terpadu yang sudah menyatukan anggaran rutin dan pembangunan.

Perubahan juga terjadi di BPKP. Yang semula BPKP



memposisikan diri sebagai auditor ekstern kemudian menjadi auditor intern. Kita bekerja lebih kepada atas dasar profesionalisme pegawai atau permintaan, bukan karena adanya payung hukum yang mendasarinya. Audit di Bidang Akuntan Negara, Investigasi dan Instansi Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan permintaan. Di Bidang APD kegiatannya kemudian lebih banyak melayani kebutuhan Pemda dalam pengelolaan keuangan negara. Kita antara lain turut membantu dalam penyusunan Neraca Awal, penerapan penganggaran berbasis kinerja, penyusunan Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah.

Kebutuhan / permintaan atas penerapan pengelolaan keuangan yang baik di pemerintahan daerah, sebagian besar dapat dipenuhi oleh BPKP. Kini mungkin BPKP adalah "pemimpin pasar" dalam membantu pengelolaan keuangan terutama di Pemerintah Daerah. Hal tersebut

dapat disebabkan SDM kita lebih *dahulu siap*.

Akan tetapi keadaan ini bisa saja berubah, karena pesaing di luar semakin banyak yang muncul, " Ada gula ada semut". Banyak Perguruan Tinggi sekarang membuka jurusan khusus Akuntansi Sektor Publik, sehingga akan banyak SDM terdidik yang dapat dimanfaatkan pesaing. Selain itu, BPK bisa jadi pada suatu saat, selain melakukan audit juga memberikan asistensi.

Persaingan tersebut menuntut pegawai berubah untuk terus siap meningkatkan kapasitas diri. Tanpa peningkatan kapasitas diri pada seluruh pegawai maka permintaan tersebut mungkin tidak dapat dilayani, atau dapat juga dilayani, namun pelayanannya bisa jadi dibawah standar.

Kita sadar "kualitas" merupakan hal yang paling harus dijaga. Akan tetapi apakah hal tersebut memang telah disikapi oleh seluruh pegawai yang ada, untuk selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Mau memanfaatkan sedikit waktu di masa luangnya di kantor untuk menambah wawasan. Ataupun berinvestasi untuk pengembangan diri. Permintaan yang banyak mungkin dapat membuaikan diri untuk tidak melakukan peningkatan diri. Toh! selama ini "kepakai" juga dalam penugasan.

Akan tetapi apakah kita baru akan berbenah untuk meningkatkan kapasitas diri ketika persaingan sudah semakin sengit dan permintaan turun. Yang jelas pada pasar persaingan monopolistik dimana terdapat banyak penjual, penjual yang memiliki diferensiasi produk-lah (biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SDM hebat, R&D unggul dan jaringan pemasaran luas) yang akan unggul. Kalau hal tersebut telah terjadi maka baru terasa perlunya peningkatan kapasitas diri. Tetapi bisa jadi sudah terlambat kalau baru melakukannya. Padahal pengembangan diri merupakan bagian dari budaya kerja "PIONIR" yang harus melekat pada diri kita. Perubahan yang pasti akan terus berlangsung. Menurut Eileen Rachman (Kompas, 26/7/2008) di tengah dunia yang kini kian kompetitif dan berubah dan dimana akses informasi menjadi sangat berlimpah dan terbuka hanya individu dan organisasi yang senantiasa belajar-lah yang bisa *survive*.

RASAKAN NIKMATNYA BERKOMUNIKASI

By: didik krisdiyanto

Seorang Auditor digambarkan wajahnya berkerut, jarang senyum, bahasanya selalu “seharusnya”, angkuh, sok tahu, dan sebagainya. Mudah-mudahan gambaran seperti itu tidak ada lagi selaras dengan peran pengawasan sekarang ini. Apa bisa? Pasti bisa. Tim BUKA memberi TIP untuk kita semua bagaimana berkomunikasi yang efektif. Tujuh cara efektif dalam berkomunikasi :

1. Hindari kesan memaksa.

Ketika kita berkomunikasi hindari kalimat : “**Kamu harus.....**” baiknya diganti dengan “**Sebaiknya kamu.....**” atau “**Maukah kamu.....**”

2. Fokus kepada solusi bukan masalah.

Ketika berkomunikasi fokuskan kepada hal yang menjadi **solusi bukan masalah**. Contoh : Ketika makanan di rumah habis, tidaklah efektif jika kita berkata “Aduh Lapar banget.....” lebih baik kita berkata “Yuuk, beli makanan di luar.....”

3. Ubah “kata tidak bisa ” menjadi “bisa”.

Ketika kita diminta untuk mengadakan pertemuan, lebih baik anda mengatakan “**Kita bisa mengadakan pertemuannya minggu depan**” daripada berkata “**Kita tidak bisa ketemuan sampai minggu depan**” walaupun dua kalimat dengan arti yang sama tapi estetikanya berbeda.

4. Ambil tanggung jawab dan jangan menyalahkan.

Hindari kalimat “ **Ini bukan salahku**” lebih baik ganti dengan kalimat “ **Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya**”

5. Katakan apa yang anda inginkan bukan yang tidak anda inginkan.

Jika anda tidak ingin seseorang menyetir ngebut, lebih baik berkata “**Tolong bawa mobilnya hati-hati**” daripada anda berkata “**Jangan bawa mobilnya terlalu kencang**”

6. Fokus pada masa depan bukan masa lalu.

Jika ada kesalahan teman anda daripada anda berkata “ **Saya sudah bilang sebelumnya.....**” lebih baik diganti dengan “ **Mulai sekarang, kita.....**”

7. Bagikan informasi bukan argumen.

Hindari kalimat, “Tidak, kamu salah.....” lebih baik diganti dengan “Saya ingin seperti ini.....”

Coba dan rasakan mulai saat ini dan seterusnya

AKUNTAN NEGARA

Jasa Keakuntan-negaraan di Provinsi Sulawesi Selatan

Oleh : Ichsan Riyandi

Kegiatan Bidang Akuntan Negara telah berkembang dari yang sebelumnya hanya audit dan audit menjadi jasa manajemen dan sedikit audit. Artinya proporsi untuk audit keuangan tidak terlalu dominan dan lebih ditekankan kepada kegiatan untuk menunjang kebutuhan stakeholder dalam meningkatkan kinerjanya atau istilah kerennya meyakinkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang dapat mencapai kinerja yang bermutu yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan penurunan jumlah kemiskinan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi sebagai pengawas yang memberi *feedback* berupa jasa konsultasi manajemen bagi keyakinan mutu (*quality assurance*).

Kebutuhan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja tentu memerlukan informasi yang memadai dan akurat, masukan-masukan yang inovatif, sharing pengalaman dari entitas lain yang sejenis, perhitungan dan analisis yang mantap. Wilayah itulah yang selama ini terabaikan di pihak lain manajemen sangat membutuhkan. Oleh karena itu perlu kita isi dengan

keahlian dimiliki oleh insan BPKP tak terkecuali di Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Jasa manajemen yang dapat diberikan adalah terkait dengan Good Corporate Governance, Key Performance Indicator, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Badan Layanan Umum, Audit Kinerja, Audit Keuangan, serta audit lain sesuai permintaan.

Untuk bisa berkiprah secara efektif, langkah awal perlu dilakukan identifikasi target bidikan yang ada. Domain bidikan kegiatan keakuntan-negeraan di wilayah Sulsel adalah BUMN dan BUMD. Hasil bidikan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 8 BUMN dan 57 BUMD berupa PT Bank Sulsel, 28 PDAM, dan 28 RSUD. (lihat tabel).

DATA BUMN di Provinsi Sulawesi Selatan												
No	Nama BUMND	Jasa Akuntan Negara										
		GCG	KPI	MR	TI	SIA	M AS	BLU	GA	KIN	LAIN	
1	PT SEMEN TONASA			A								
2	PT Industri Kapal Indonesia											
3	PT. PELINDO IV (Persero)	SA	A								SA	
4	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	SA								SA	SA	
5	BULOG Divre Sulsel											
6	LPP TVRI Makassar											
7	LPP RRI Makassar											
8	PT Kawasan Industri Makasar	SA										
S = Sudah, A = Akan												

Sebagaimana tampak dalam tabel di samping menunjukkan bahwa belum seluruh BUMN yang ada dapat 'tersentuh' oleh keahlian yang kita miliki berkaitan dengan jasa manajemen BPKP.

Namun demikian hal ini sangat bergantung dengan keinginan manajemen serta ketentuan yang berlaku (dari Kementerian BUMN).

Sedangkan bagi perusahaan daerah, karena kondisi, malah sangat bergantung dengan jasa yang dimiliki BPKP.

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D) memiliki peran strategis dalam mendorong laju perekonomian Negara dan memiliki arti penting untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah kepada masyarakat.

Seiring misi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah mendorong peningkatan kinerja BUMN/BUMD/ BUL melalui Audit Kinerja Sektor Korporat.

Dalam hal ini BPKP ikut berperan melalui jasa keakuntan-negeraan tersebut.

Sebagaimana tampak dalam tabel di samping menunjukkan bahwa PDAM di Sulsel hampir seluruhnya telah dimediasi dan tertangani dengan baik. Hanya sedikit yang 'untouchable'. Namun hal ini telah dilakukan pendekatan sebaik mungkin kepada manajemen yang bersangkutan baik secara struktural, kultural, maupun melalui pihak lain yang terkait seperti Perpamsi.

Wal hasil seluruhnya telah 'menikmati' hasilnya walau pun belum maksimal. Terlebih lagi dalam upaya penyehatan PDAM yang selama ini telah didung-dung oleh pemerintah pusat.

Menurut informasi dari berbagai sumber, diketahui bahwa 63 PDAM di seluruh Indonesia akan

memperoleh dana penyehatan yang 13 PDAM diantaranya berada di Sulsel. Ke 13 PDAM tersebut telah difasilitasi melalui audit kinerja dan audit keuangan

DATA BUMD di Provinsi Sulawesi Selatan												
No	Nama BUMN/D	Jasa Akuntan Negara										
		GCG	KPI	MR	TI	SIA	M AS	BLU	GA	KIN	LAIN	
1	PT BPD Sulsel									SA	SA	SA
2	PDAM Kota Makassar		A			A				SA	SA	SA
3	PDAM Bantaeng					A				SA	SA	
4	PDAM Barru									SA	SA	
5	PDAM Bone					A				SA	SA	
6	PDAM Enrekang									SA	SA	
7	PDAM Gowa					SA				SA	SA	
8	PDAM Jeneponto									SA	SA	
9	PDAM Kota Palopo		A			A				SA	SA	
10	PDAM Pangkep									SA	SA	
11	PDAM Kota Pare-pare					A				SA	SA	
12	PDAM Sidrap									SA	SA	
13	PDAM Sinjai					A				SA	SA	
14	PDAM Soppeng									SA	SA	
15	PDAM Tana Toraja									SA	SA	
16	PDAM Wajo									SA	SA	
17	PDAM Takalar					SA				SA	SA	
18	PDAM Bulukumba									SA	SA	
19	PDAM Maros									A	A	
20	PDAM Selayar									A	A	
21	PDAM Pinrang									A	A	
22	PDAM Luwu									SA	SA	
23	PDAM Luwu Utara									A	A	
24	PDAM Luwu Timur									A	A	
25	PDAM Majenne									SA	SA	
26	PDAM Polewali Mandar					A				SA	SA	
27	PDAM Mamasa					A				SA	SA	
28	PDAM Mamuju									SA	SA	
29	PDAM Mamuju Utara									A	A	
S = Sudah, A = Akan												

oleh BPKP kecuali satu PDAM. Salah satu syarat PDAM memperoleh fasilitas

penyehatan yaitu PDAM menyampaikan laporan kinerja 2 tahun buku berturut-turut yang telah diaudit oleh auditor independen.

PDAM yang 'untouchable' tersebut tidak berarti menolak mentah-mentah jasa yang ditawarkan BPKP, namun lebih karena kondisi PDAM yang 'unauditable' sehingga perlu perlakuan khusus serta keterbatasan tenaga auditor, serta ada PDAM yang masih dalam proses pembentukan (PDAM Mamuju Utara, PDAM Luwu Timur).

Berdasarkan hasil pendataan, 'lahan' berikutnya yang masih berupa padang luas yang selama ini belum tergarap yang masih ada hubungannya dengan program kesehatan dalam ranah keakuntan-negeraan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang masih dalam format SKPD untuk difasilitasi menjadi format Badan Layanan Umum.

Ternyata rumah sakit daerah akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya dalam format badan layanan umum dengan memperhatikan koridor ketentuan keuangan negara/ daerah yang berlaku. Tidak sedikit RSUD yang berkeinginan mengubah pola pertanggung- jawaban keuangan dalam format BLU namun pada tahap awal perlu persiapan yang lengkap dan terarah termasuk basis pelaporan akuntansi keuangannya.

DATA RUMAH SAKIT Pusat/Daerah												
No	Nama BUMN/D	Jasa Akuntan Negara										
		GCG	KPI	MR	TI	SIA	M As	BLU	GA	KIN	LAIN	
1	RSU Dr Wahidin Sudirohusodo (Pst)							A				
2	RS Jiwa Ujung Pandang											
3	RSU Labuang Baji											
4	RS Kusta Ujung Pandang											
5	RS Haji											
6	RSUD Prof Dr Mohamad Anwar Makattutu											
7	RSU Barru											
8	RSU Tenriawaru Bone											
9	RSU Bulukumba											
10	RSU Enrekang											
11	RSU Sungguminasa											
12	RSU Jeneponto							A				
13	RSU Andi Jemma Masamba, Luwu Utara											
14	RSU Daya											
15	RSU Salewangeng Maros											
16	RSU Palopo											
17	RS Kusta Kalang-kalang, Palopo											
18	RSUD Pangkep											
19	RSUD Andi Makasau, Pare-pare											
20	RSU Nene Mallomo, Sidrap							A				
21	RSU Sinjai											
22	RSU Ajapange, Soppeng											
23	RSU Selayar											
24	RSU Lamadukeleng, Sengkang											
25	RSU Pattallassang, Takalar											
26	RS Kusta Batuleleng, Tana Toraja											
27	RSU LakiPadada. Tana Toraja											
28	RSU Lasinrang, Pinrang							A				
S = Sudah, A = Akan												

Sebagaimana dalam tabel di samping, tampak bahwa tidak kurang dari 28 RSUD yang ada di wilayah Sulsel dan Sulbar.

Jasa keakuntan-negeraan belum nampak pada seluruh rumah sakit yang ada. Pemandangan ini sangat kontras dibandingkan dengan Perwakilan BPKP di provinsi lain yang umumnya sudah merapat dengan BPKP.

Hal ini karena semata-mata karena kurangnya komunikasi kepada stake holder serta manajemen yang bersangkutan, serta terbatasnya tenaga PFA yang ada.

Antisipasi kedepan dalam waktu tidak terlalu lama, perlu ditingkatkan kapabilitas PFA-nya sehingga kebutuhan manajemen seperti yang diungkap tersebut di atas dapat terlayani dengan sebaik-baiknya

PROFIL PDAM SULSEL

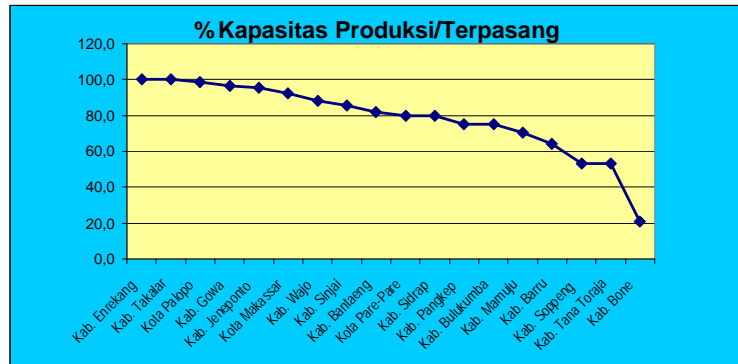
Oleh : Ichsani Riyandi

Kondisi PDAM tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2007. Kondisi keuangan sebagian besar PDAM saat ini tidak memungkinkan untuk beroperasi mencapai target yang ditetapkan dalam hal pemberian layanan air minum tanpa campur tangan pemerintah pusat/daerah .

Penginderaan atas keuangan PDAM melalui instrumen rasio keuangan, saat ini berada dalam keadaan kritis. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai operasi sehari-harinya, tidak mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya dan bahkan bila dipaksakan beroperasi terus-menerus dalam keadaan kerugian berturut-turut berakibat posisi modalnya negatif yang seharusnya secara teknis dinyatakan pailit.

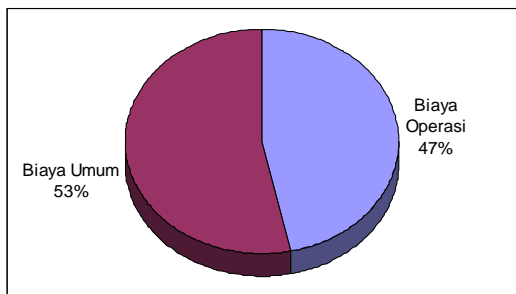
Gambar disamping menunjukkan % rasio Total Hutang terhadap Nilai Asset yang mengindikasikan sebagian besar PDAM nilai hutangnya melebihi asset yang dimiliki yang akhirnya nilai ekuitas perusahaan negatif, atau secara total hutang sebesar Rp 390 milyar melebihi nilai assetnya sebesar Rp 379 milyar. Hal ini terjadi karena penghasilan PDAM tidak mampu menopang beban hutang kepada pemerintah beserta bunganya dan bahkan sebagian besar tidak mampu menutup biaya operasional dan biaya umumnya sehingga merugi terus menerus.

Gambaran secara keseluruhan ternyata biaya umum lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional-nya. Hal ini mengindikasikan adanya biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan operasi perusahaan namun tetap menjadi beban, yang akhirnya harga pokok air jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif air. Separuh PDAM di Sulsel dan Sulbar tarif air rata-rata dibawah harga pokok bahkan biaya operasional sehari-hari. Untuk melakukan investasi kembali memerlukan investasi besar, PDAM tidak mampu kecuali Pemda ikut campur tangan. Disisi lain ternyata cakupan pelayanan atau penduduk yang terlayani kurang dari 60 %.



Gambar di samping menunjukkan cakupan layanan PDAM. Bahwa masih sedikit PDAM yang cakupan layanan-nya di atas 60 % yang berarti belum seluruh masyarakat menikmati air bersih yang tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatannya karena air bersih merupakan kebutuhan pokok disamping pendidikan dan tersedianya lapangan kerja.

Biaya operasional yang menonjol yang tidak dapat dihindari adalah beban biaya listrik PLN guna menaikkan elevasi air sejak dari sumber air maupun pada tingkat distribusi. Hanya 2 PDAM yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kab Enrekang yang sebagian besar menggunakan sistem gravitasi sehingga biaya listrik PLN dapat ditekan.



Untuk meningkatkan cakupan layanan tentu harus meningkatkan sambungan ke pelanggan. Namun disisi lain kapasitas terpasang sangat terbatas. gambar disamping menunjukkan ternyata sebagian besar PDAM kapasitas produksi telah sesuai dengan kapasitas terpasang yang berarti perlu investasi yang cukup untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan pokok air bersih.

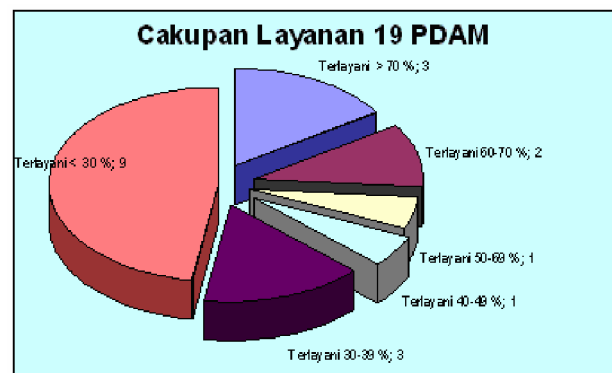
Beberapa faktor penyebab yang terdeteksi berkenaan dengan

pengelolaan PDAM terkait hal tersebut di atas antara lain :

1. Kebijakan pengelolaan keuangan yang tidak profesional, diantaranya pengelolaan Piutang Usaha yang dibiarkan menumpuk sehingga menjadi investasi terbesar dalam Aktiva Lancarnya sementara posisi kasnya sangat minim. Corporate Plan dan atau RKAP yang disusun sebagai alat pengendali operasional perusahaan baik jangka pendek maupun jangka menengah, kurang realistis. Rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM ikut menyumbang kegagalan perusahaan.
2. Kebijakan Pemda yang tidak mendukung dengan adanya keharusan bagi PDAM untuk membayar uang muka setoran laba disisi lain kondisi perusahaan yang selalu merugi.
3. Kondisi operasional perusahaan yang tidak mendukung terbentuknya laba bagi perusahaan baik dari sisi pendapatan maupun beban biayanya.

§ Dari sisi pendapatan :

- Tingkat kebocoran air yang tinggi sebagai akibat kerusakan jaringan pipa yang sudah tua, tidak berfungsinya water meter induk, banyaknya meter air pelanggan yang rusak, adanya sambungan liar ataupun insentif bagi petugas pembaca meter yang dipandang sudah tidak memadai.
- Tarif rata-rata penjualan air yang berada dibawah harga pokok produksi air (biaya dasar) karena sikap Pemda maupun legislatif yang masih acuh terhadap jasa layanan PDAM dan lambatnya proses persetujuan kenaikan tarif . (Cat : dengan terbitnya Permendagri 23/2006, usul kenaikan tarif tidak perlu persetujuan DPRD)



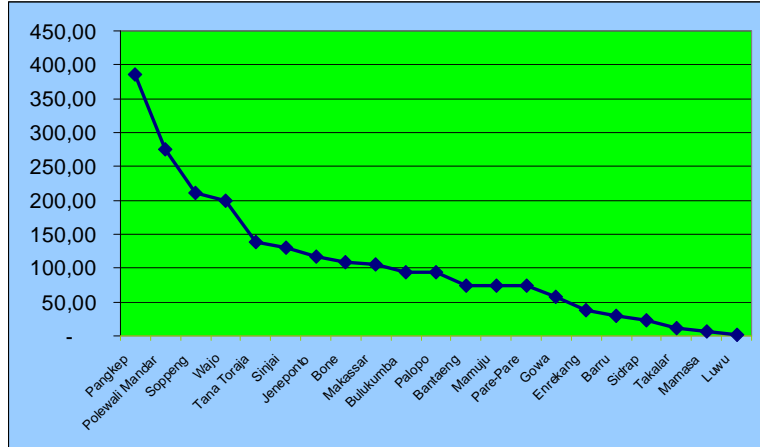
§ Dari sisi beban biaya :

- Tingginya beban biaya administrasi dan umum dibanding biaya produksi langsung karena besarnya beban bunga dan denda Hutang Jangka Panjang kepada Pemerintah / RDI yang terus bertambah besar setiap tahun, sebagai konsekuensinya tidak terbayarnya angsuran pokok, bunga dan denda karena tidak tersedianya dana.

Keseluruhan hal di atas mengakibatkan pertumbuhan perusahaan terhambat dan tidak memungkinkan perusahaan meningkatkan kualitasnya untuk menghasilkan air minum maupun untuk mencapai target pelayanan bagi 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Millenium Development Goals, UU No 7/2004 maupun PP No 16/2005.

Terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kebuntuan hal di atas yaitu :

1. Restrukturisasi modal dan hutang.
Kebaikan : sangat dibutuhkan PDAM
Kelemahan : kriteria dan persyaratan teknis sulit dipenuhi
2. Suntikan dana segar untuk investasi baru
Kebaikan : meningkatnya cakupan layanan untuk jangka panjang
Kelemahan : keterbatasan dana pemerintah
3. Pemberian subsidi
Kebaikan : hanya untuk jangka pendek
Kelemahan : memerlukan langkah pengendalian khusus, menjadi ketergantungan
4. Penyesuaian tarif sesuai Permendagri 23 Tahun 2006
Kebaikan : hanya untuk jangka pendek
Kelemahan : memerlukan sosialisasi waktu lama dan kemungkinan adanya penolakan oleh masyarakat
5. Intensifikasi penagihan
Kebaikan : mengoptimalkan kinerja karyawan
Kelemahan : kemungkinan timbulnya gejolak di masyarakat, adanya ketidakakuratan pencatatan pemakaian air.



Pembenahan manajemen PDAM secara internal, dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai kinerja PDAM secara maksimal sebagaimana yang tertera dalam Millenium Development Goals.

RENCANA TINDAK YANG DIHARAPKAN OLEH PENGAMBIL KEPUTUSAN :

1) Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan berkoordinasi untuk melaksanakan Instruksi Presiden dengan menyiapkan program dan mengalokasikan dana dan atau tambahan penyertaan modal dari APBN untuk keperluan investasi / peningkatan kapasitas operasi PDAM.

2) Pemerintah Daerah

Bersama legislatif mendorong dan memfasilitasi :

- § Pemrosesan penyesuaian tarif air minum sesuai ketentuan Permendagri No 23 tahun 2006
- § Pembahasan Corporate Plan dan RKAP PDAM yang mengarah pada upaya pencapaian sasaran MDG's tentang pelayanan air minum
- § Memberi kemudahan bagi PDAM termasuk meniadakan target PAD dari pembayaran angsuran laba selama operasinya masih merugi
- § Mempertimbangkan bantuan dana dan atau tambahan penyertaan modal dari APBD untuk keperluan investasi / peningkatan kapasitas operasi PDAM

3) Direksi PDAM

- § Mengintensifkan penagihan piutang dan menerapkan kebijakan penagihan termasuk pengenaan denda dan sanksi pemutusan secara konsekuen dengan didahului sosialisasi kepada masyarakat
- § Melakukan rekonsiliasi saldo Piutang Usaha secara periodik antara Bagian Pembukuan dan Bagian Hubungan Pelanggan/Penagihan sehingga saldo Piutang selalu up-to-date
- § Memperbaiki jaringan distribusi air yang rusak dan mengganti meter air pelanggan yang rusak.
- § Mengadakan atau memperbaiki water meter induk.
- § Menertibkan sambungan liar dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi petugas yang terlibat didalamnya

- § Menyesuaikan pemberian insentif bagi petugas pembaca meter air
- § Menyusun Corporate Plan dan RKAP sesuai ketentuan dengan memperhatikan seluruh kepentingan tersebut di atas.
- § Mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dan pelayanan rekening air berbantuan komputer.

---o0o---

CAPACITY BUILDING

MENGGARAP LADANG ILMU Ana & Naomi

Ibarat sebuah ladang, maka perpustakaan adalah tempat dimana kita bisa menanam benih dan memetik hasil. Tentu saja seberapa besar hasil yang akan dipanen sangat tergantung pada bagaimana ladang tersebut digarap. Perpustakaan bisa disebut sebagai sebuah ladang ilmu yang bisa menghasilkan secara material maupun non material seandainya ia dikelola secara serius. Perpustakaan pun bisa dianggap sebagai sebuah investasi karena ia bagian dari sebuah proses pendidikan yang membawa pencerahan bagi masyarakat.

Di Australia, sebenarnya tidak banyak masyarakat yang bisa mengenyam bangku kuliah. Tapi jangan heran kalau wawasan lulusan high schoolnya sangat luas. Tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa menggali ilmu karena dia bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mengasah otaknya. Pemerintah menyediakan perpustakaan disetiap subdistrict atau pada tingkat kecamatan, kalau disini. Buku-buku anak dalam sampul yang bagus dan tebal yang pasti menarik perhatian setiap anak mudah diakses oleh semua orang. Demikian halnya dengan alat-alat permainan anak, seperti puzzle, alat musik, mobil-mobilan yang bisa dikendarai, monopoli dll bisa dipinjam tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.



Pentingnya perpustakaan sebagai ladang ilmu pun sangat disadari oleh salah satu instansi pemerintah pusat di Sulsel, yaitu Lembaga Administrasi Negara. 7.523 judul buku mengisi ruang perpustakaan seluas sekitar 15 X 15 meter ini. Dari ensiklopedia amerika hingga majalah gatra dengan mudah bisa ditemukan disini. Ratusan buku manajemen, ekonomi, pemerintahan daerah, perencanaan, ke-organisasi-an, pengembangan diri menghiasi rak-rak buku yang tertata dengan baik.

Dengan fasilitas perpustakaan yang lengkap dalam sebuah ruangan yang nyaman ini, tak heran kalau instansi yang berlokasi di

Sulsel ini mampu menghasilkan jurnal ilmiah setiap triwulan. Tersedianya literatur dari luar ataupun dalam negeri tidak dapat dipungkiri menarik pegawai untuk selalu meng-up date diri dengan ilmu ketata-pemerintahan yang lebih.



Membandingkan perpustakaan perwakilan BPKP Sulsel dengan LAN tentu saja tidak seperti membandingkan antara apel dengan apel. Sebagai institusi yang berfokus pada pengembangan aparatur, tentu LAN dituntut untuk lebih menekankan pada capacity building. Salah satunya dengan penyediaan fasilitas perpustakaan yang OK. BPKP, di sisi lain, fokus utamanya adalah memberikan jasa-jasa audit ataupun asistensi ke Pemda. Namun demikian, semangat untuk merevitalisasi perpustakaan kita harus tetap dikobarkan. Agar ladang ilmu kita memberikan panen yang melimpah, maka langkah-langkah usulan yang mungkin bisa dilaksanakan:

kita harus tetap dikobarkan. Agar ladang ilmu kita

1. Penetapan / pembentukan pengurus perpustakaan :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Pengurus Manajemen
 - c. Staff Pelaksana
2. Penertiban administrasi perpustakaan :
 - a. Pengklasifikasian buku berdasarkan disiplin ilmu
 - b. Pembuatan aturan standar secara tertulis tentang peminjaman buku di perpustakaan & ketertiban di ruang perpustakaan.

3. Perlunya penataan ruangan perpustakaan :
 - a. Penataan atas letak Rak Buku
 - b. Penataan buku/majalah sesuai klasifikasi disiplin ilmu
 - c. Perlunya musik pendukung di dalam perpustakaan
 - d. Jika memungkinkan adanya sofa di dalam ruangan perpustakaan
 - e. Perlunya perubahan warna atas ruangan perpustakaan/pengecetan
 - f. Perlunya fasilitas internet di dalam ruangan Perpustakaan

PROFIL

PANTANG MENYERAH

Penggagas ide makan siang bersama di kantor ini ternyata juga senang mengotak-katik mesin mobil dan barang elektronik. Termasuk printer di bidang Akuntan Negara yang bisa dibilang kurang berfungsi pun bisa beroperasi dengan baik atas hasil kerja bapak Ikhsan Riyandi. Mungkin ini pengaruh sifat pantang menyerah dalam jiwa Pak Ikhsan. Kalau orang lain mungkin sudah menyerah melihat printer atau mesin apa saja yang rusak lalu menyerahkan pada teknisi. Sifat yang pantang menyerah ini terlihat dari pilihan atlit favouritenya, Stefie Graff. Menurutnya, atlit tenis ini mempunyai sifat mental yang bagus dan pantang menyerah yang sama dengannya.



Penggemar musik jazz ini juga mengaku bahwa beliau termasuk penikmat film-film yang bertema spionase. Roger Moore adalah salah satu aktor idolanya. Setiap sabtu minggu, beliau tidak pernah melewatkan waktunya dengan bermain tennis atau menyantap ikan bersama keluarga di Ratu Guruh.

Sebagai Kepala Bidang Akuntan Negara, Pak Ikhsan berharap agar staf-staf BPKP sulsel mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pekerjaan dan meningkatkan kebersamaan. Salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pria yang mendalami teknologi informasi ini adalah piknik bersama seluruh staf bidang Akuntan Negara

Nama	:	Ikhsan Riyandi
NIP	:	060063765
Tanggal Lahir	:	Magelang. 1-04-1962
Alamat rumah	:	Jl Andi Mangerangi No 36 P Kompleks BPKP No HP 08164309313
E-mail	:	ichsan.Riyandi@bpkp.go.id ; ichsan_riyandi@yahoo.co.id
Pendidikan	:	DIV STAN
Keluarga	:	
- Istri	:	Kusmiarsih
- Anak	:	Hanun Ayu Kemala Sari Hasan Stania Nurmalita Fadel Abdurrafi Kamanjaya
Jenjang Karir	:	Kepala Seksi di Palu – 2001 Dalnis di Palu – 2002 Kepala Bidang Investigasi di Kalbar – 2003 Kepala Bidang Akuntan Negara di Sulsel – 2007 sampai sekarang
Hobby	:	Tennis Lapangan
Resto Favourite	:	Ratu Guruh

Tantangan Dan Kesabaran

Hidup ini penuh tantangan dan harus dihadapi, karena itu hadapilah dengan sabar. Begitulah prinsip hidup yang selalu dipegang oleh Bapak Ahmda Dahlan. Pria yang keempat cerpennya pernah dimuat di majalah HAI ini mengaku bahwa sebenarnya beliau senang menulis. Kesibukan di kantor dan keluarga lah yang menjadi kendalanya untuk kembali menyalurkan bakat kepenulisannya.

Pak Dahlan, begitu sapaannya, mengabdikan di BPKP sejak tahun 1990, tepatnya di Perwakilan Kalimantan Selatan. Pengalaman auditnya yang paling berkesan adalah saat beliau ditugaskan di Inhutani II di Kotabaru Kalsel yang mengharuskannya tinggal di hutan selama 40 hari. Yang paling tidak bisa dilupakannya adalah saat Pak Dahlan masuk hutan dan bertemu dengan seekor ular, makhluk yang paling ditakutinya hingga kini. Terpaksa beliau lari tunggang langgang dan penuh dengan keringat dingin.

Pria penggemar ikan bakar dan mie pangsit ini mengaku bahwa beliau mempunyai hobby tennis lapangan, volley dan piknik. Impian mantan aktivis OSIS dan Senat ini adalah menunaikan ibadah haji dan melanjutkan S2.



Nama	:	Akhmad Dahlan, SE
NIP	:	740003839
Tanggal Lahir	:	Pare-Pare 25 Juni 1966
Alamat rumah	:	Jl Tamalanrea Selatan IV Blok M 19 BTP
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi Akuntansi (STIE Banjarmasin)
Keluarga	:	
- Istri	:	Dra. Andi Mustaina – Ibu Rumah Tangga
- Anak	:	Suwandy Aditya – SMP Negeri 30 Makassar kelas 3 Muh. Fahri Hidayatullah – SD Inpres Tamalanrea kelas 3 Muh. Fahmi – SD Inpres Tamalanrea Kelas 1
Jenjang Karir	:	BPKP Kalsel – 1990 BPKP Sulsel – 1998 BPKP Maluku – 2003 BPKP Sulsel – 2008
Hobby	:	Tennis Lapangan, Volley Ball dan Piknik
Makanan Favourite	:	Ikan Bakar dan Mie Pangsit

Terus Bekerja

Kalau anda pecinta durian, maka Pak Budiman adalah orang yang paling tepat diajak berbincang-bincang. Kecintaannya akan durian dibuktikan dengan aktivitasnya yang secara kontinyu merawat kebun seluas 7 hektar di Bulukumba dan Sinjai. Makanya, kalau ingin tau kiat-kiat memilih durian, Pak Budiman bisa menjelaskan secara panjang lebar.

Pengabdianya di BPKP tak di ragukan lagi. Sebelum bekerja di BPKP, pria yang berulang tahun pada tanggal 21 Mei ini mengawali karir di PT Putra Kalimantan, perusahaan agen tunggal mesin-mesin konstruksi, sebagai sales administrator selama 2 tahun. Selama berkiprah di BPKP beliau pernah merasakan menjadi pegawai termuda sekaligus tertua. Penugasan di seluruh bidang di Perwakilan BPKP Jakarta pernah dilakoninya selama 20 tahun sebelum akhirnya pindah ke daerah kelahirannya di Sulsel.

Jiwa entrepreneurship nampaknya juga tumbuh dalam jiwa Bapak yang satu ini. Antara tahun 1995-1998 beliau mengelola usaha es cendol yang mempunyai puluhan cabang. Kemudian, dari tahun 1998-2000 beliau membuka kaki lima seafood di halaman parkir sanggar Suara Mahardika.

“Terus Bekerja” adalah motto hidupnya. Beliau terinspirasi oleh sang Ibu yang menghidupi empat bersaudara ini sendiri setelah ditinggal sang Ayah sejak Pak Budiman berusia 17 tahun. Makanya, Beliau pun berharap agar rekan-rekan di BPKP Sulsel ini menjadi pegawai yang suka bekerja, mempunyai integritas dan tidak suka berbuat macam-macam.

Nama	:	Budiman A. Pakki, Ak. MM
NIP	:	060056509
Tanggal Lahir	:	21 Mei 1954
Alamat rumah	:	Jl Alauddin no 228 Makassar
E-mail	:	Budiman.pakki@yahoo.com
Pendidikan	:	MM dari BPKP
Keluarga	:	
- Istri	:	Sri Supartinah- Pegawai DJP
- Anak	:	- Martini Budiman- Model - Oscar Lagaligo – Bank Mandiri - Abdullah Pawawoi – KAP Deloitte - Citra Rosa Budiman – Kuliah di Perth
Jenjang Karir	:	Kanwil 2 DJPKN Jakarta – 1983 Perwakilan BPKP DKI Jakarta 1983-2002 BPKP Sulsel
Hobby	:	Berkebun
Resto Favourite	:	

HUMOR

Macan dari Taman Safari

By: Ichsan Riyandi

Satu rombongan turis BPKP pergi ke Taman Safari didampingi seorang Guide cewek. Melihat-lihat jenis-jenis hewan dan asalnya, sampailah rombongan ke habitat macan. Dengan sigap si Guide menerangkan tentang macan tersebut secara serius.

- Guide : Para pengunjung yang terhormat, sebenarnya jumlah macan yang ada di habitat ini sebanyak 15 ekor.
- Pengunjung : Jadi sekarang tinggal berapa ekor, mBak?
- Guide : Tinggal 12 ekor, karena yang 3 melarikan diri
- Pengunjung : Wuah bahaya dong !!! Terus gimana Mbak lanjutannya.?
- Guide : Ternyata yang 3 tersebut ditemukan di Jakarta
- Pengunjung : Maksudnya, sesudah memangsa orang ...begitu ?
- Guide : Bukan, yang 3 itu menjelma jadi **“TRIO MACAN”**...
- Pengunjung : Ha...ha...ha...ha (terbuahak-buakak)...

KRITIK LAGU ANAK-ANAK

By: Wiwiet Ediwaty Winarso

Karena rakyat Indonesia sejak dini sudah didoktrin dengan lagu2 yang tidak bermutu & mengandung banyak kesalahan, mengajarkan kerancuan, dan menurunkan motivasi.

mari kita buktikan :

'Balonku ada 5... rupa-rupa warnanya... merah, kuning, kelabu..

merah muda dan biru... meletus balon hijau, dorrrr!!!
Perhatikan warna-warna kelima balon tsb, kenapa tiba2 muncul warna hijau? Jadi jumlah balon sebenarnya ada 6, bukan 5 ! -;) Pantes anak SD susah berhitung!

'Aku seorang kapiten... mempunyai pedang panjang..kalo berjalan prok..prok.. prok... aku seorang kapiten!' Perhatikan di bait pertama dia cerita tentang pedangnya, tapi di baitkedua dia cerita tentang sepatunya (inkonsistensi) Harusnya dia tetap konsisten, misal jika ingin cerita tentang sepatunya seharusnya dia bernyanyi : 'mempunyai

sepatu baja (bukan pedang panjang)..
kalo berjalan prok..prok.. prok..'
nah, itu baru klo! jika ingin cerita tentang
pedangnya, harusnya dia
bernyanyi : 'mempunyai pedang
panjang... kalo berjalan ndul..gondal.
..gandul.. atau srek.. srek.. srek..' itu baru
sesuai dgn kondisi pedang panjangnya!

~~~~~  
'Bangun tidur ku terus mandi.. tidak lupa  
menggosok gigi..  
habis mandi ku tolong ibu.. membersihkan  
tempat tidurku..' Perhatikan setelah habis  
mandi langsung membersihkan tempat  
tidur.

Lagu ini membuat anak-anak tidak bisa  
terprogram secara baik dalam  
menyelesaikan tugasnya dan selalu  
terburu-buru.

Sehabis mandi seharusnya si anak pakai  
baju dulu dan tidak langsung  
membersihkan tempat tidur dalam kondisi  
basah dan telanjang!

~~~~~  
'Naik-naik ke puncak gunung..
tinggi.. tinggi sekali..kiri kanan kulihat
saja.. banyak pohon cemara.. 2X'
Lagu ini dapat membuat anak kecil
kehilangan konsentrasi, semangat dan
motivasi!

Pada awal lagu terkesan semangat akan
mendaki gunung yang tinggi tetapi
kemudian ternyata setelah melihat jalanan
yg tajam mendaki lalu jadi bingung dan
gak tau mau berbuat apa, bisanya cuma
noleh ke kiri ke kanan aja, gak maju2!

~~~~~  
'Naik kereta api tut..tut..tut. . siapa hendak  
turut ke Bandung .. Sby..bolehlah naik  
dengan naik percuma..ayo kawanku lekas  
naik.. keretaku tak berhenti lama'  
Nah, yg begini ini yg parah! mengajarkan  
anak-anak kalo sudah dewasa maunya  
gratis melulu.  
Pantesan PJKA rugi terus! terutama jalur  
Jakarta-Malang dan Jakarta-Surabaya !

~~~~~  
'Di pucuk pohon cempaka.. burung
kutilang berbunyi.. bersiul2 sepanjanghari
dg tak jemu2..mengganggu2 sambil
bernyanyi tri li li..li..li.. li..li.'
Ini juga menyesatkan dan tidak
mengajarkan kepada anak2 akan realita
yg sebenarnya. Burung kutilang itu kalo
nyanyi bunyinya cuit..cuit.. cuit !
kalo tri li li li itu bunyi kalo yang nyanyi
orang (catatan: acara lagu anak2 dgn
presenter agnes monica waktu dia masih
kecil adalah Tra la la trili !!), bukan
burung!

~~~~~  
'Pok ame ame.. belalang kupu2.. siang  
makan nasi, kalo malam minum susu..  
Ini jelas lagu dewasa dan tidak konsumsi  
anak2! karena yg disebutkan di atas itu  
adalah kegiatan orang dewasa, bukan  
anak kecil. Kalo anak kecil, karena belum  
boleh maem nasi, jadi gak pagi gak  
malem ya minum susu!

~~~~~  
'Nina bobo nina bobo oh nina bobo..
kalau tidak bobo digigit nyamuk'
menurut psikolog: jadi sekian tahun anak2
indonesia diajak tidur dgn lagu yg penuh
nada mengancam

~~~~~  
'Bintang kecil dilangit yg biru..' (Bintang  
khan adanya malem, lah kalo malem  
mang warna langitnya biru?)

~~~~~  
'Ibu kita Kartini...harum namanya'
(Namanya Kartini atau Harum?)

~~~~~  
'Pada hari minggu..naik delman istimewa  
kududuk di muka'  
(Nah, gak sopan khan..masa duduk di  
muka???)

---

## HOT NEWS

---

### **Remunerasi News Up Date**

Kalau dalam edisi pertama, bulletin ini membahas Remunerasi secara umum, kali ini hasil wawancara dengan Bapak Tahmid Husen, KTU kita, mungkin akan membawa sedikit titik terang. Tanggal 27 Juni lalu beliau menghadiri pembahasan pagu indikatif 2009. Menurut pemaparan Kepala Biro Kepegawaian, seperti yang diungkapkan Bapak Tahmid, Remunerasi di BPKP sudah mendapat green light. (Semoga Menkeu juga segera memberikan green light-red).

Telah difahami bersama bahwa syarat utama diterapkannya remunerasi adalah adanya reformasi birokrasi. Reformasi ini mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Reformasi kelembagaan dianggap sudah dilaksanakan jika sudah disahkan RPP Pengawas Intern Pemerintah dan Perpres tentang BPKP. Menurut penuturan Pak Tahmid, kedua produk perundangan ini diharapkan terbit dalam waktu dekat (Semoga benar...). Yang kedua, Ketatalaksanaan yang mencakup analisa jabatan termasuk penetapan grade dan SOP atas

tiap-tiap jabatan sudah ada draftnya. Terakhir, SDM, mencakup assesment, mutasi, kode etik pegawai, reward and punishment. Point yang ketiga ini sudah dilaksanakan. Artinya sebenarnya ketiga aspek reformasi birokrasi sudah disiapkan. Tinggal menunggu pengesahan RPP Pengawasan Intern Pemerintah dan Perpres tentang BPKP, remunerasi bakal terealisasi. Pertanyaannya.. kapankah kedua produk perundangan itu disahkan?????????????

*(mbah paraiatte: au' ah gelap)*

## Pemilihan Pegawai Teladan

Setelah melewati proses penyeleksian yang cukup panjang, akhirnya Panitia Pemilihan Pegawai Teladan Perwakilan BPKP Sulsel menetapkan Ibu Dwiyani Susanti dan Bapak Johanis Bokko sebagai karyawan teladan tahun 2007/2008.



Ajang pemilihan karyawan BPKP teladan ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh BPKP Pusat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memacu semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan BPKP. Di akhir kegiatan, seluruh pegawai teladan dari masing-masing propinsi akan berkumpul di Lembang, Bandung tanggal 25-29 Agustus 2008 untuk diberikan penghargaan langsung oleh Kepala BPKP dalam acara Forum Budaya Kerja.

“Kita tidak akan pernah bisa merubah dunia sebelum kita memulai merubah diri kita sendiri”. Selamat... Semoga perbuatan dan tingkah laku yang baik dapat menjadi suri tauladan dan dapat memacu semangat kerja rekan-rekan yang lain untuk dapat berubah kearah yang lebih

baik.  
Seperti

### Data Pegawai Teladan Perwakilan BPKP Sulsel PFA :

Nama Dwiyani Susanti  
NIP 740005035  
Pangkat / Golongan Penata Muda Tk. I / III B  
Tempat Tanggal Lahir Madiun, 11 September 1974  
BidWas APD  
Riwayat Pendidikan D.III STAN 1995  
Alamat Rumah Jalan Bontobila III / 9 A  
Telp 085242001274

### Data Pegawai Teladan Perwakilan BPKP Sulsel Non PFA :

Nama Johanis Bokko  
NIP 740001011  
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I / III B  
Tempat Tanggal Lahir Makassar, 24 April 1959  
BidWas Tata Usaha / Sub Bag Keuangan  
Riwayat Pendidikan S1 STIA YPUP Makassar  
Alamat Rumah Komplek Hartaco Jaya, No.2 / 16,  
Makassar  
Telp 081343339988

---

## INFO PENUGASAN

---

By: Ifah Oktavia

Kesibukan bulan Agustus di Bidang Akuntan Negara didominasi oleh kegiatan Audit Umum atas Laporan keuangan dan Audit Kinerja PDAM. Selain kegiatan tersebut, dilakukan pula pendampingan penetapan harga wajar dan evaluasi prosedur pelelangan aset yang akan dilelang PT PN XIV (Persero). Target evaluasi LAKIP yang ditetapkan oleh pusat mengharuskan bidang APD untuk mengerahkan segenap sumber daya untuk melakukan evaluasi di beberapa kabupaten. Bidang IPP, di sisi lain, disibukkan oleh kegiatan pemeriksaan dana dekonsentrasi, DHS, MCMRP dan Askeskin. Kegiatan Bidang Investigasi didominasi oleh kegiatan audit investigasi dan pemberian keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi. Berikut adalah daftar penugasan bidang-bidang pada BPKP Sulsel.

| NO | URAIAN                                                                         | BIDANG |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Bone TB 2007      | AN     |
| 2  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Bulukumba TB 2007 | AN     |
| 3  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Barru TB 2007     | AN     |
| 4  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Sinjai TB 2007    | AN     |
| 5  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Enrekang TB 2007  | AN     |
| 6  | Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja PDAM Kab. Pangkep TB 2007   | AN     |

|    |                                                                                                                                                          |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | Pendampingan Penetapan Harga Wajar dan Evaluasi Prosedur Pelelangan Aset yang akan Dilelang PT. PN XIV (Persero)                                         | AN  |
| 8  | Penyusunan Perubahan APBD dalam SIMDA Versi 2,1 di Kab. Luwu Utara                                                                                       | APD |
| 9  | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Mamuju                                                                                                                    | APD |
| 10 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Majene                                                                                                                    | APD |
| 11 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kota Palopo                                                                                                                    | APD |
| 12 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Soppeng                                                                                                                   | APD |
| 13 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Bulukumba                                                                                                                 | APD |
| 14 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Selayar                                                                                                                   | APD |
| 15 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Barru                                                                                                                     | APD |
| 16 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Pangkep                                                                                                                   | APD |
| 17 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Tana Toraja                                                                                                               | APD |
| 18 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Sinjai                                                                                                                    | APD |
| 19 | Evaluasi LAKIP Tahun 2007 Kab. Takalar                                                                                                                   | APD |
| 20 | Pendampingan dan Asistensi Penyusuna LAKIP Pemkab. Mamuju Utara Tahun 2007                                                                               | APD |
| 21 | Perpanjangan ST Asistensi Implementasi SIMDA BMD Pemkab. Wajo                                                                                            | APD |
| 22 | Perpanjangan ST dan Bimtek Pelaporan Akuntansi dengan SIMDA Pemkab. Maros                                                                                | APD |
| 23 | Asistensi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Tahun 2008 Kab. Pangkep                                                         | APD |
| 26 | Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Perpajakan Kab. Takalar                                                                                     | APD |
| 27 | Narasumber Seminar Kebijakan Akuntansi dan Pelatihan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan SKPD Kab. Tator                                     | APD |
| 28 | Narasumber Optimalisasi Peran Legislatif Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peningkatan Kapasitas Legislatif dan Tata Kelola Keuangan Daerah | APD |
| 29 | DHS Prov. Sul-Sel                                                                                                                                        | IPP |
| 30 | DHS Kab. Bone                                                                                                                                            | IPP |
| 31 | MCRMP Kab. Maros                                                                                                                                         | IPP |
| 32 | DHS Kota Makassar                                                                                                                                        | IPP |
| 33 | MCRMP Prov. Sul-Sel                                                                                                                                      | IPP |
| 34 | DHS Kab. Barru                                                                                                                                           | IPP |
| 35 | DHS Kab. Bantaeng                                                                                                                                        | IPP |
| 36 | MCRMP Kab. Pangkep                                                                                                                                       | IPP |
| 37 | DHS Kab. Polman                                                                                                                                          | IPP |
| 38 | MCRMP Kab. Takalar                                                                                                                                       | IPP |
| 39 | DHS Kab. Gowa                                                                                                                                            | IPP |
| 40 | DHS Kab. Wajo                                                                                                                                            | IPP |
| 41 | aSKESKINKAB. Mamuju                                                                                                                                      | IPP |
| 42 | PEMP Kab. Majene                                                                                                                                         | IPP |
| 43 | PEMP Kab. Maros                                                                                                                                          | IPP |
| 44 | Askeskin Kab. Polewali                                                                                                                                   | IPP |
| 45 | PEMP Kab. Bone                                                                                                                                           | IPP |
| 46 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Depag Prov. Sulbar                                                                                        | IPP |
| 47 | Dana Dekonsentrasi Prog. Waji Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Prov. Sul-Sel                                                                        | IPP |
| 48 | Dana Dekonsentrasi Prog. Waji Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Prov. Sul-Sel                                                                        | IPP |
| 49 | Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesjahteraan Sosial dan Linmas Prov. Sul-Sel                                                                               | IPP |
| 50 | Program Pendidikan Menengah Depag Prov. Sulbar                                                                                                           | IPP |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 51 | Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Tak Tersangka pada Sekretariat Daerah Kab. Pinrang TA 2003                                                                                                 | INVES |
| 52 | Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Stadion Olahraga Watampone TA 2005, 2006 dan 2007                                                                                                              | INVES |
| 53 | Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Terminal Agrobisnis Kab. Enrekang TA 2007                                                                                                                      | INVES |
| 54 | Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare TA 2007                                                                                               | INVES |
| 55 | Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD (SIMRSU) RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap TA 2007                                                                                   | INVES |
| 56 | Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk Pengadaan Pupuk pada Dinas Pertanian Daerah Kab. Jeneponto TA 2007                                             | INVES |
| 57 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pengadaan Genset di RSUD Belopa TA 2004 di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo                                                            | INVES |
| 58 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Kab. Polman TA 2007                                                                          | INVES |
| 59 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar TA 2007                                                                                | INVES |
| 60 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada BKM Pare Lino Kab. Maros TA 2007                    | INVES |
| 61 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembanguna Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene TA 2006            | INVES |
| 62 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara TPK Penyimpangan Pelaksanaan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pemda Kab. Takalar a.n. terdakwa Drs. H. Hanafi, MM di Pengadilan Negeri Takalar                                 | INVES |
| 63 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara TPK a.n. terdakwa Ir. Akil Ahmad di Pengadilan Negeri Takalar                                                                                                                  | INVES |
| 64 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara TPK a.n. terdakwa Muhammad hayat, S.Pd Bin Nawawi Tadjo di Pengadilan Negeri Pinrang                                                                                           | INVES |
| 65 | Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara TPK Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja- Jasa Konstruksi pada PT. BPD Sul-Sel Cab. Pasangkayu a.n. terdakwa Yaumil RM di Pengadilan Negeri Mamuju | INVES |
| 66 | Pemberian Keterangan Ahli di PN Polewali atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Bangunan dan Kolam Air Panas Buntukasasi Kab. Mamasa TA 2003                                                 | INVES |

## KATA MEREKA

### Pertanyaan: Perubahan apa yang anda harapkan pada BPKP Sulsel selain remunerasi?



Akhzan Runi:  
Meningkatkan etika berorganisasi melalui peningkatan integritas setiap Pegawai BPKP.

Yohanis Daun Pute:  
Pelatihan-pelatihan di kantor sendiri utamanya dalam hal program-program (khususnya APD) agar di intensifkan.



Anwar Saifuddin:

Kejelasan uraian tugas dalam setiap penugasan dari anggota tim sampai pengendali teknis.



Sugeng S:



Perputaran pegawai yang konsisten dan terpadu serta transparan dengan diawali membuat SOP tentang perputaran pegawai sehingga peluang untuk mendapatkan ilmu penugasan lebih merata ke semua pegawai.

Abdoel Rofiek:

Peningkatan SDM melalui pelatihan ataupun pendidikan yang langsung bisa dibiayai oleh perwakilan atau paling tidak memberikan semacam bimbingan bagi pegawai yang mau mengambil beasiswa dari kantor atau dari luar kantor.



Ramlah Malahika:



Finger Print sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pemotongan TC. Agar pegawai tidak hanya berorientasi pada pemenuhan absen karena ada kondisi-kondisi tertentu dimana pegawai tidak bisa absen, misalnya langsung ke obrik.

Juhe:



Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja kantor.



Gusti Arif:

Penugasan kapan sebaiknya setiap ketua tim dan anggota tim diberikan penugasan karena bisa mengikuti tim berikutnya.

---

## REDAKSI

---

Kritik dan saran dapat dikirimkan ke meja redaksi yang bermarkas di bidang APD:

1. [Didik.krisdiyanto@bcpk.go.id](mailto:Didik.krisdiyanto@bcpk.go.id)
2. [Toniyulianto@yahoo.com](mailto:Toniyulianto@yahoo.com)
3. [a\\_nanana\\_s@yahoo.com](mailto:a_nanana_s@yahoo.com)

Di tunggu lho.....Tulisan yang dimuat akan mendapat ucapan terima kasih dan senyuman yang paling manis dari seluruh redaksi.

# Selamat Bekerja dan Berkarya